



**SIKAP POLITIK SOEKARNO TERHADAP
PARTAI MASYUMI 1957-1960**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial

Oleh

Zaini Muslim Ahmad

NIM.3111409006

**JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 28 Februari 2013

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dra. C Santi Muji Utami, M.Hum
NIP.19650524 199002 2 001

Insan Fahmi Siregar, S.Ag.,M.Hum
NIP.19730127 200604 1 001

Mengetahui:
Ketua Jurusan Sejarah

Arif Purnomo, SS., S.Pd., M.Pd.
NIP. 19730131 199903 1 002

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 28 Februari 2013

Penguji Utama

Drs.Bain, M.Hum
NIP. 19630706 199002 1 001

Penguji I

Penguji II

Dra. C Santi Muji Utami, M.Hum
NIP.19650524 199002 2 001

Insan Fahmi Siregar, S.Ag.,M.Hum
NIP.19730127 200604 1 001

Mengetahui :

Dekan

Dr. Subagyo, M.Pd
NIP.19510808 1 98003 1003

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 11 Februari 2013

Zaini Muslim Ahmad
NIM.3111409006

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Ruangan tanpa pintu bukan berarti tak ada jalan untuk keluar (Jokowi)

Untuk kedua orang tuaku (alm) Bapak.
Sadikin dan Ibu Rosita, serta bagi semua orang
yang tengah memperjuangkan nasib baiknya.
Tiada kata berhenti untuk terus berarti !

PRAKATA

Segala puji kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan kasih dan sayangNya kepada penulis dalam setiap waktu. Hanya berkat pertolongan dan kuasaNya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **Sikap Politik Soekarno Terhadap Partai Masyumi 1957-1960** sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Sejarah, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Soedijono Sastroatmojo, M.Si. Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Subagyo, M.Pd. Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis.
3. Arif Purnomo, S.Pd., S.S., M.Pd Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis.
4. Dra. C Santi Muji Utami, M.Hum. Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan saran dan motivasi kepada penulis.
5. Insan Fahmi Siregar, S.Ag.,M.Hum. Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan saran dan motivasi kepada penulis.

6. Seluruh bapak/ ibu dosen Jurusan Sejarah yang telah banyak mentransferkan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Selurruh staff dan karyawan Jurusan Sejarah yang telah turut membantu penulis dalam menempuh studi.
8. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi khususnya angkatan Ilmu Sejarah 2009 yang telah mewarnai haru biru perjalanan hidup penulis.
9. Keluarga besar di Cianjur, terima kasih atas segala bantuan dan motivasinya.
10. Makun yang telah menjadi kamus hidup si penulis selama satu tahun belakang ini, “dengannya saya tidak perlu menjadi orang lain”.
11. Keluarga kost (alm) Abdullah yang telah merelakan rumahnya menjadi tempat bernaung selama penulis menempuh studi.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis, nyata maupun gaib.

Semoga semua budi baik yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.

Semarang, Februari 2013

SARI

Zaini Muslim Ahmad. 2013 *Sikap Politik Soekarno Terhadap Partai Masyumi 1957-1960*. Skripsi. Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Dra. C Santi Muji Utami, M.Hum. Pembimbing II : Insan Fahmi Siregar, S.Ag., M.Hum.

Kata kunci: Sikap Politik Soekarno, Partai Masyumi

Kemitraan politik Soekarno dengan Partai Masyumi yang selama 11 tahun dibina (1945-1956) akhirnya di tahun 1957 berubah menjadi sikap permusuhan yang tajam. Kemacetan politik sebagai akibat dari prematurnya Demokrasi Liberal dan desakan cita-cita Revolusi Indonesia yang menuntut untuk diselesaikan, menjadi faktor pendorong Soekarno untuk bersikeras mengambil alih kekuasaan. Langkah Soekarno dalam mengambil kekuasaan dengan merubah sistem pemerintahan dan tatanan demokrasi mengundang perlawanan dari Partai Masyumi. Sikap oposisi yang kemudian ditunjukkan Partai Masyumi, mengundang reaksi keras dari Soekarno yang telah mendapatkan kembali kekuatan politiknya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana sikap politik Soekarno dalam mengatasi kemacetan politik ?, (2) Bagaimana sikap Soekarno terhadap Partai Masyumi pada masa Demokrasi Terpimpin ?, (3) Bagaimana reaksi Partai Masyumi terhadap perubahan sikap politik Soekarno ?.

Metode penelitian yang dipakai adalah metode sejarah yaitu dengan melalui langkah-langkah heuristik, kritik sumber, interpretasi dan penulisan sejarah atau historiografi.

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut : (1) Sikap Soekarno dalam mengatasi kemacetan politik adalah dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke UUD 1945, dekrit ini juga menjadi titik awal bergulirnya Demokrasi Terpimpin yang menampilkan Soekarno sebagai pemimpin yang otoriter. (2) Partai Masyumi yang dianggap oleh Soekarno sebagai golongan kontra revolusi kerap mendapatkan ‘pengkebirian politik’ dan sampai akhirnya dibubarkan melalui Penpres No. 7/1959 dan Keppres No.200/1960. (3) Partai Masyumi merespon perubahan sikap politik Soekarno dengan selalu menunjukkan sikap oposisi pada langkah, kebijakan dan kepemimpinan Soekarno.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Ruang Lingkup.....	16
F. Metode Penelitian.....	17
G. Tinjauan Pustaka	22

BAB II. KONSEPSI PRESIDEN : SOLUSI KEMACETAN POLITIK DALAM
KEMELUT PRO KONTRA

A. Latar Belakang Lahirnya Konsepsi Presiden	30
B. Implementasi Konsepsi Presiden	42
C. PRRI/ Permesta Bentuk Lain Sikap Oposisi Beberapa Tokoh Partai Masyumi.....	45

BAB III. LAHIRNYA DEMOKRASI TERPIMPIN DAN FASE PENGIKISAN
PENGARUH PARTAI MASYUMI

A. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 : Babak Awal Demokrasi Terpimpin.....	53
B. Pengikisan Pengaruh Partai Masyumi.....	55
C. Pengaruh PKI Terhadap Soekarno : Faktor Lain Di Balik Penyudutan Partai Masyumi.....	65

BAB IV. PEMBUBARAN PARTAI MASYUMI

A. Penpres : Alat Soekarno untuk Melenyapkan Partai Masyumi.....	75
B. Liga Demokrasi : Perlawanan Terakhir Partai Masyumi	84
C. Pembubaran Partai Masyumi : Tumbal dari Logika Revolusi Soekarno.....	94

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
--------------------	----

DAFTAR PUSTAKA	xiii
----------------------	------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	xvi
------------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Hasil Pemungutan Suara Majelis Konstituante Tahun 1959 Tentang Anjuran Kembali ke Ideologi Pancasila dan UUD 1945.....	52
4.1 Perbandingan Partai-Partai dan Perwakilan di Parlemen Maret 1951, Agustus 1956, Juli 1960.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Lembaran Negara Republik Indonesia No.75/1959.....	xvii
Lampiran 2 Lembaran Negara Republik Indonesia No.149/1959.....	xix
Lampiran 3 Lembaran Negara Republik Indonesia No.24/1960.....	xxiii
Lampiran 4 Lembaran Negara Republik Indonesia No.79/1960.....	xiv
Lampiran 5 Lembaran Negara Republik Indonesia No.78/1960.....	xviii
Lampiran 6 Statemen Partai Masyumi No.125/Sek. PP/M.VIII/1958.....	xxxi
Lampiran 7 Statemen Partai Masyumi No.1130/Sek.PP/M.VIII/1958.....	xxxii
Lampiran 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia No.200/1960.....	xxxiii
Lampiran 9 Pimpinan Partai Masyumi No.180/B/VI-25/60.....	xxxiv
Lampiran 10 Artikel Suara Merdeka.....	xxxviii
Lampiran 11 Surat Penetapan Dosen Pembimbing.....	xxxiv
Lampiran 12 Surat Ijin Penelitian.....	xxxv
Lampiran 13 Dokumentasi Foto.....	xxxvi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia politik adalah dunia yang bergumul dengan kepentingan kekuasaan. Setiap individu atau kelompok yang telah mengikrarkan dirinya terjun ke dunia politik, teramat naif apabila tidak mengemban misi untuk merengkuh kekuasaan. Banyak cara yang ditempuh untuk meraih kekuasaan atau mempertahankannya, dari mulai membangun hubungan koalisi sampai menenyapkan musuh yang dianggap membahayakan. Dalam kacamata politikus penilaian antara mitra dan musuh begitu samar, karena segala sesuatunya baru bisa dilihat jelas atas dasar kepentingan. Sebuah ungkapan anonim berbunyi bahwa *dalam politik tidak ada kawan abadi atau musuh abadi tetapi yang ada hanyalah kepentingan abadi*. Hal itu pula lah yang tercermin dalam hubungan politik antara Presiden Soekarno dengan Partai Masyumi.

Partai Masyumi adalah partai Islam pertama yang didirikan pasca kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tanggal 7 November 1945, dibidani dalam sebuah kongres para pemimpin umat Islam di gedung Madrasah Mu`alimin Muhammadiyah, Yogyakarta (Maarif, 1996 : 31). Kongres yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Islam dari kalangan modernis dan tradisionalis ini melahirkan kesepakatan untuk mendirikan partai politik Islam yang diberi nama Masyumi atau kependekkan dari Majelis Syura Muslimin Indonesia. Tujuan didirikannya Partai Masyumi sebagaimana dinyatakan dalam anggaran

dasarnya yakni “*terlaksana ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara Republik Indonesia, menuju keridhaan Ilahi*” , tujuan ini kemudian dijabarkan dalam Tafsir Azas Masyumi yang kedudukannya sebagai penjelasan/*manifest* dari ideologi Islam yang dianut oleh Partai Masyumi (Jurdi, 2008 : 165).

Di usia yang relatif muda Partai Masyumi telah berhasil mendapatkan peranan yang luar biasa dalam percaturan politik nasional. Beberapa kali tokoh elite Partai Masyumi mendapatkan tugas penting kenegaraan dari Presiden Soekarno. Sjarifuddin Prawiranegara, pengurus DPP Partai Masyumi, pernah diberikan mandat untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat, pada saat ibu kota RI di Yogyakarta berhasil diduduki Agresi Militer Belanda II dan beberapa tokoh sentral negara seperti Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditahan oleh militer Belanda. Sjarifuddin Prawiranegara sebagai Ketua PDRI berhasil menyelenggarakan pemerintahan Indonesia selama rentang waktu 7 bulan (22 Desember 1948 - 13 Juli 1949). Mohammad Roem yang duduk di Pengurus Besar Partai Masyumi pernah ditunjuk sebagai delegasi RI dalam perundingan dengan Belanda di tahun 1949 atau yang lebih dikenal dengan Perundingan Roem-Roijen. Begitupula Assat yang juga anggota pengurus DPP Partai Masyumi pernah didaulat menjadi Presiden RI di waktu struktur kenegaraan menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Soekarno pada waktu itu menjadi Presiden RIS.

Partai Masyumi juga memperlihatkan sikap loyal mempertahankan kedaulatan bangsa, terbukti saat munculnya ancaman dari Sekutu pada akhir bulan Oktober dan awal November tahun 1945, Partai Masyumi menyatakan bahwa perang mempertahankan tanah air Indonesia adalah Perang Sabil, suatu kewajiban yang melekat pada semua orang muslim (Ricklefs, 2005 : 325). Begitu juga ketika kedaulatan RI terancam oleh kehadiran NII (Negara Islam Indonesia) yang diproklamirkan SM Kartosoewiryo di Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus 1949, Partai Masyumi secara tegas menentangnya, bahkan Mohammad Natsir, tokoh elite Partai Masyumi, ditunjuk pemerintah sebagai ketua komisi RI untuk penyelesaian NII dengan tugas membujuk SM Kartosoewiryo agar kembali ke pangkuan RI, walaupun usaha itu berujung gagal (Noer, 1987 : 182).

Sepanjang pemerintahan bergulir (1945-1957), tokoh-tokoh elite Partai Masyumi seringkali mendapatkan posisi di kabinet dimulai dari Kabinet Soekarno di tahun 1945 sampai Kabinet Ali Sastroamidjojo II di tahun 1957. Di era Demokrasi Liberal beberapa kali Partai Masyumi mendapatkan posisi sebagai formatur kabinet sekaligus menjadi Perdana Menteri, antara lain Kabinet Mohammad Natsir (1950-1951), Kabinet Soekiman Wirdjosandjojo (1951-1952), Kabinet Boerhanoeddin Harahap (1955-1956).

Namun hubungan kedekatan Partai Masyumi dengan Presiden Soekarno perlahan mulai merenggang di awal tahun 1957, ketika Presiden Soekarno mengambil perubahan orientasi sikap dalam menilai jalannya sistem multipartai di Indonesia, yang dengan eksplisit menyampaikan keinginannya

untuk mendirikan satu partai negara dan mengubur partai-partai yang lainnya (Suryanegara, 2010 : 366). Kehadiran multipartai dalam ranah demokrasi Indonesia, dianggap oleh Soekarno sebagai penyakit kepartaian, penyakit yang lebih parah dari perasaan kesukuan dan kedaerahan, penyakit yang disinyalir Soekarno menyebabkan bangsa kita selalu cakar-cakaran satu sama lain (Karim, 1983 : 140). Menanggapi pernyataan presiden itu, Mohammad Natsir menegaskan selama demokrasi masih ada, selama itu pula partai-partai terus ada (Noer, 1987 : 354).

Tidak saja sistem multipartai yang diserang dan dikecam Soekarno, Demokrasi Liberal pun jadi sasaran kritiknya. Soekarno mengatakan bahwa Demokrasi Liberal adalah demokrasi impor (Barat), bukan demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia (Rahardjo, 2001 : 168). Kecaman Soekarno terhadap Demokrasi Liberal tidak lepas dari sikap kecewa Soekarno terhadap realitas politik parlemen Indonesia yang sering diwarnai jatuh bangunnya kabinet dalam waktu yang singkat, yakni dalam kurun 11 tahun (1945-1956) terjadi 10 kali pergantian kabinet . Iklim politik parlemen yang tidak sehat ini menyebabkan kinerja pemerintahan sering tidak berjalan efektif yang ujungnya berdampak pada kemacetan total dalam pembangunan bangsa dan negara.

Menurut alam ambisi politik Soekarno, revolusi Indonesia belumlah selesai sepenuhnya. Sejauh ini revolusi baru dalam taraf revolusi ekonomi belum menyentuh revolusi yang mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang seratus persen berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi dan

berkepribadian dalam kebudayaan. Di samping itu, bagi Soekarno gambaran ancaman imperialisme dan kolonialisme belumlah berakhir, dan ia merasa perlu untuk terus memeranginya. Keberhasilan Soekarno dalam menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 adalah suatu cara dia untuk menghimpun negara-negara lain dalam sebuah kubu menghadapi negara-negara Barat yang tetap dianggapnya sebagai musuh (Sjamsuddin (ed), 1988 : 91)

Dalam pusran Perang Dingin yang tengah berlangsung antara Blok Timur yang berhaluan Sosialis Komunis dan Blok Barat yang Liberalis Kapitalis, meskipun Soekarno kerap kali menyatakan posisi Indonesia sebagai negara yang netral tetapi kenyataan politik yang ada, Soekarno hendak membawa Indonesia untuk cenderung ke Blok Timur. Itu bisa dilihat dari sikap keras Soekarno terhadap Blok Barat, tapi di sisi lain bersikap mesra dengan Blok Timur. Secara pribadi Soekarno memang bukanlah seorang yang anti komunis dan secara politik ia membutuhkan dukungan Blok Timur untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat yang melibatkan kekuatan Barat di belakangnya. Namun citra tangan terbuka dengan Blok Timur yang Sosialis Komunis terganjal oleh kenyataan politik dalam negeri, yakni PKI sebagai representasi kekuatan komunis selalu dikucilkan dalam setiap pembentukan kabinet. Mekanisme demokrasi di parlementer tidak pernah memberikan kesempatan untuk merangkul PKI dalam setiap pembentukan kabinet, hal ini terjadi karena partai-partai Islam, khususnya Partai Masyumi sebagai partai Islam terbesar dan cukup memiliki pengaruh yang kuat di parlemen enggan

untuk berkolaborasi dengan PKI yang mereka anggap tidak menghormati paham agama (Samsuri, 2004 : 62)

Atas dasar pertimbangan politik bahwa Demokrasi Liberal telah menjauhkan bangsa dari cita-cita revolusioner (*Harian Suara Merdeka* edisi 4 Februari 1957), Demokrasi Liberal hanya menjadi alat untuk menjegal salah satu komponen kekuatan politik bangsa (unsur komunis /PKI) . Maka pada tanggal 21 Februari 1957 di hadapan para pemimpin partai politik dan tokoh masyarakat di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengemukakan konsep politik demokrasinya yang kemudian lebih dikenal sebagai Konsepsi Presiden. Konsepsi Presiden ini pada pokoknya berisi : (1) Sistem Demokrasi Liberal atau Parlemerter tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia oleh karena itu mesti diganti dengan Sistem Demokrasi Terpimpin (2) Menyusun Kabinet Empat Kaki dengan merangkul empat partai politik besar yakni PNI, Partai Masyumi, Partai NU dan PKI (3) Membentuk Dewan Nasional yang terdiri dari golongan-golongan fungsional (Sekretariat Negara RI, 1997 : 39)

Konsepsi Presiden ini menimbulkan gejolak pro dan kontra baik di dalam parlemen maupun di masyarakat. Dua partai garda terdepan yang menolak yakni Partai Masyumi dan PSI, menyatakan bahwa Konsepsi Presiden yang menyatakan akan membentuk Dewan Nasional, dianggapnya sebagai pelanggaran fundamental terhadap konstitusi negara karena lembaga tersebut tidak dikenal dalam konstitusi (Gafar, 2006 : 25). Sementara di daerah, Konsepsi Presiden ini memicu ketegangan sosial, Gerakan Dewan-Dewan daerah mencuat ke permukaan. Gerakan Dewan-Dewan itu merupakan

gerakan yang digalang oleh kelompok militer yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan pusat yang dianggap selalu menekankan masalah politik tetapi mengabaikan pembangunan pada daerah-daerah. Gerakan Dewan-Dewan ini muncul di kota-kota besar di Sumatera dan Sulawesi seperti Medan, Padang dan Manado. Dampak dari gejolak-gejolak tersebut pada tanggal 14 Maret 1957 Kabinet Ali Sastroamidjojo II tidak mampu melanjutkan kerjanya dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno (Suryanegara, 2010 : 371)

Jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II memberikan celah meluluskan Soekarno dalam mempraktikan konsepsinya, yakni menyusun Kabinet Empat Kaki. Presiden Soekarno kemudian menunjuk Soewirjo dari PNI untuk menjadi formatur, tetapi Soewirjo tidak berhasil dalam menyusun Kabinet Empat Kaki (Suryanegara, 2010 : 372). Sebab dari kegagalan ini adalah karena partai-partai Islam seperti Masyumi dan NU menolak untuk duduk bersama dengan PKI dalam satu kabinet. Untuk memecahkan kebuntuan, akhirnya Presiden Soekarno menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur. Hasilnya pada tanggal 9 April 1957 Soekarno mengumumkan terbentuknya Kabinet Karya dibawah pimpinan politisi non-partai yakni Djuanda Kartawidjaja sebagai Perdana Menterinya.

Setelah Kabinet Karya berhasil disusun, kemudian di bulan Mei 1957 menyusul dibentuk Dewan Nasional yang terdiri dari 41 anggota mewakili golongan karya, plus anggota *ex-officio* yang semuanya ditunjuk secara musyawarah oleh Presiden Soekarno dengan kabinet (*Harian Suara Merdeka*, edisi 8 Juni 1957) . Soekarno menjadi ketua Dewan Nasional tapi urusan

sehari-hari dipegang oleh wakil ketua Roeslan Abdulgani, yang kemudian tampil sebagai penganjur dipercepatnya ide demokrasi terpimpin digulirkan (Anwar, 1995 : 177). Roeslan Abdulgani sendiri adalah seorang sosialis yang memiliki kedekatan dengan Soekarno dan mendukung Indonesia menuju negara yang sosialisme seperti Soekarno cita-citakan.

Selama masa pemerintahan Kabinet Karya banyak diwarnai dengan gejolak-gejolak peristiwa politik. Dimulai dari percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno pada tanggal 30 November 1957, saat itu presiden tengah menghadiri harlah Perguruan Cikini ke 15 tahun, yang kemudian peristiwa itu lebih dikenal dengan Peristiwa Cikini. Peristiwa yang terjadi di Jakarta Utara itu kemudian dipolitisir oleh golongan yang anti-Partai Masyumi dengan menghembuskan isu bahwa orang-orang Partai Masyumi merupakan dalang dibalik aksi. Tuduhan itu bersandar pada pengakuan para pelaku yang mengaku sering menghadiri kursus-kursus kader yang diadakan oleh tokoh-tokoh Partai Masyumi (IN, 1980 : 217)

Isu ini menjadi alat untuk mendiskreditkan Partai Masyumi, sebab Partai Masyumi sebelumnya sudah distigma sebagai partai oposisi yang paling vokal menentang Soekarno. Maka tidak heran pasca Peristiwa Cikini, beberapa tokoh Partai Masyumi merasa dirinya tidak aman tinggal di Jakarta karena hampir setiap hari diteror dan diintimidasi oleh golongan pemuda tak dikenal (Gafar, 2006 : 62) Atas dasar itu pula Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara dan para tokoh Partai Masyumi lainnya bertolak dari Jakarta menuju Padang pada Desember 1957. Padang dijadikan tempat pelarian sebab

secara politis Padang merupakan pusat konsentris kekuatan Gerakan Dewan-Dewan yang melakukan sikap oposisi terhadap pemerintahan pusat. Hal ini memberikan keuntungan politis terhadap para tokoh Partai Masyumi tersebut untuk memulai aksi politik selanjutnya. Benar saja, di sana para tokoh Partai Masyumi tersebut kemudian bergabung dengan Gerakan Dewan Daerah atau disebut juga Gerakan Militer Daerah. Belakangan tidak hanya tokoh Partai Masyumi saja yang bergabung dengan kelompok ini melainkan Sumitro Djojohadikusumo dari PSI juga turut menggabungkan diri.

Pada tanggal 10 Februari 1958 kaum pembangkang Padang (sebutan bagi kelompok yang dibina antara Dewan-Dewan Daerah di Sumatera dengan Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara dan Sumitro Djojohadikusumo) mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah dengan batas tempo lima hari. Isi ultimatum itu yakni; (1) Kabinet Karya/Djuanda harus dibubarkan (2) Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwana IX harus ditunjuk untuk membentuk suatu kabinet baru sampai terselenggaranya pemilihan umum (3) Mengembalikan Soekarno kepada presiden konstitusional (Ricklefs, 2005 : 396) Mereka pun mengancam seandainya tuntutan ultimatum itu tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat maka mereka akan membentuk pemerintahan sendiri.

Namun setelah tenggat waktu yang telah ditentukan, pemerintah pusat tetap bergeming terhadap tuntutan ultimatum itu. Maka pada tanggal 15 Februari 1958 dibentuklah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang berpusat di Bukit Tinggi serta mengangkat Sjarifuddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri (Gafar, 2006 : 63). Dua hari kemudian

Gerakan Piagam Perjuangan Semesta (Permesta) yang digagas oleh Dewan-Dewan Daerah di Sulawesi menyatakan diri bergabung dengan PRRI. Menyikapi gejolak di daerah ini, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah tindakan militer tegas terhadap PRRI-Permesta (Anwar, 1995 : 178).

Keterlibatan beberapa tokoh Partai Masyumi dalam PRRI-Permesta membuat Sukiman Wirdjosandjojo gusar, sebagai Wakil Ketua I Partai Masyumi dia wajib menyelamatkan partai dari sanksi sosial dan politik. Hal ini cukup beralasan bahwa keterlibatan Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara dalam gejolak di daerah (PRRI-Permesta) bukanlah instruksi dari partai (Suryanegara, 2010 : 378). Sebab sebelumnya DPP Partai Masyumi telah berusaha menghubungi kader-kadernya di Sumatera untuk berusaha mencegah terjadinya pemberontakan, tetapi peringatan mereka tidak digubris (Ricklefs, 2005 : 396). Akhirnya pada tanggal 17 Februari 1958 Partai Masyumi mengeluarkan statement keputusan No.1130/Sek.PP/1/M.VIII/58 yang melarang anggotanya dan pimpinan Partai Masyumi memberikan bantuan kepada pemberontak (PRRI-Permesta), ditegaskan pula bahwa Partai Masyumi tidak ada rencana untuk melakukan makar pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suryanegara, 2010 : 378).

Namun seperti apa yang diungkapkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara dalam buku *API Sejarah 2* (2010 : 378) bahwa penjelasan itu tidak didengar oleh PKI yang tetap mendeskreditkan Partai Masyumi. PKI memang memiliki sejarah dendam panjang pada Partai Masyumi sejak digulingkannya Amir Sjarifoeddin oleh fraksi Partai Masyumi pasca Perundingan Renville. Konflik

yang terjadi antara tokoh Partai Masyumi dengan tokoh PKI, tidak hanya melibatkan tokoh dari kedua partai tersebut, tetapi juga melibatkan semua komponen yang ada dalam partai, termasuk di dalamnya adalah organisasi massa yang mendukung partai. (Gafar, 2006 : 130).

PKI yang pada waktu terjadinya peristiwa PRRI-Permesta itu tengah dirangkul oleh Presiden Soekarno, serasa memiliki kesempatan emas untuk menghabisi Partai Masyumi, caranya yakni dengan gencar mendorong Presiden Soekarno untuk bertindak tegas pada keberadaan Partai Masyumi yang dianggapnya sebagai kelompok kontra revolusi karena menghalangi jalannya cita-cita revolusi Indonesia. Selain itu PKI juga menuduh keterlibatan beberapa tokoh Partai Masyumi dalam PRRI-Permesta dianggap sebagai tindakan kolaborasi dengan kapitalis Amerika Serikat untuk merobohkan negara Indonesia (Ricklefs , 2005 : 396)

Diterjang terus-terusan oleh kemelut pergolakan dalam negeri akhirnya menyebabkan keberadaan Kabinet Karya pun tidak berlangsung lama, hanya bertahan selama dua tahun (9 April 1957- 5 Juli 1959). Kegagalan menciptakan komposisi empat partai politik besar dalam Kabinet Karya dan perdebatan mengenai konsensus dasar negara serta undang-undang dasar yang berlarut-larut dalam Majelis Konstituante adalah pemicu Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Keppres No.150/1959 atau Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isi dari dekrit tersebut yaitu kembali ke UUD 1945 dan membubarkan Konstituante (Lihat lampiran 1)

Dekret Presiden 5 Juli 1959 menjadi pintu gerbang bergulirnya sistem Demokrasi Terpimpin yang membuka ruang luas bagi Presiden Soekarno untuk mewujudkan konsepsinya, sebab sistem Demokrasi Terpimpin pada hakikatnya adalah sistem yang mengantarkan Presiden Soekarno untuk bertindak sebagai pemimpin diktator. Miriam Budiardjo menyebut bahwa Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dapat dipandang juga sebagai suatu usaha darurat mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat (Budiardjo, 1989 : 71).

Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, terjadi perubahan sikap yang melanda sebagian besar partai-partai Islam, yang pada sebelumnya partai-partai Islam itu menentang gerak Soekarno dengan konsepsinya (baca:Konsepsi Presiden), terutama berkenaan dengan konsep sistem Demokrasi Terpimpin, namun setelah dekrit partai-partai Islam terpecah menjadi dua kelompok. Seperti apa yang dikemukakan oleh Dr.Ahmad Syafii Ma`arif dalam buku *“Islam dan Politik; Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965”* bahwa kelompok pertama terdiri dari Partai NU, PSII dan Perti, yang akhirnya memihak Soekarno dan menyertai Demokrasi Terpimpin. Sementara kelompok lain adalah Partai Masyumi, partai yang sejak awal konsisten menentang ide Demokrasi Terpimpin berikut Konsepsi Presiden (Maarif, 1996 : 4).

Demokrasi Terpimpin menjadi titik awal digulirkannya Nasakom sebagai ideologi negara. Ideologi ini merupakan hasil sintesa dari pemikiran Soekarno yang mensinergikan antara Nasionalisme, Agamisme (dalam hal ini

Islamisme sebagai kekuatan keagamaan terbesar di Indonesia) dan Komunisme. Soekarno menilai ketiga ideologi tersebut mempunyai semangat perjuangan yang paralel yakni sama-sama anti-imperialisme kolonialisme (Kirbiantoro dan Dody Rudianto, 2006 : 36). Seperti yang dituturkan oleh Soekarno dalam buku semi otobiografinya yang berjudul “*Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*”, Soekarno mengungkapkan bahwa :

NASAKOM adalah jiwa yang berisi ketiga kekuatan di atas mana kami berdiri tegak: NAS adalah orang-orang nasionalis yang bukan komunis, A adalah agama yang anti-komunis dan KOM orang yang beraliran komunis (Adams, 1982 : 445).

Ide Nasakom juga tidak luput dari penentangan Partai Masyumi yang sedari dulu mengecam paham Komunisme karena tidak sesuai dengan falsafah Pancasila.

Demi menciptakan “harmonisasi” di parlemen, pada tahun 1960 Presiden Soekarno mengeluarkan Penpres No.3/1960 yang isinya membubarkan parlemen hasil Pemilu 1955 yang dianggap tidak sesuai dengan jiwa dan semangat UUD 1945, Demokrasi Terpimpin dan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 (Lihat lampiran 3) Sebagai gantinya dibentuklah parlemen DPR GR dengan mengangkat 283 anggota, didalamnya tidak terdapat keterwakilan Partai Masyumi dan PSI. Di tahun sebelumnya wakil Partai Masyumi pun tidak didudukkan dalam Dewan Pertimbangan Agung (Harian Suara Merdeka edisi 31 Juli 1959) . Komposisi DPR GR seperti ini konon hasil persetujuan antara Soekarno dengan Ali Sastroamidjojo, Idham Chalid dan DN Aidit (Rosihan Anwar, 1995 : 182). Dari kesepakatan antara Soekarno dengan tiga tokoh ini mencerminkan sudah

terbentuknya komposisi kekuatan Nasakom yakni Ali Sastroamidjojo sebagai pimpinan PNI mewakili ideologi Nasionalisme, Idham Chalid sebagai pimpinan Partai NU mewakili ideologi Agamisme dan DN Aidit sebagai pimpinan PKI mewakili ideologi Komunisme (Dake, 2006 : 169)

Tidak cukup disingkirkan dari parlemen, tepat pada tanggal peringatan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1960 Presiden Soekarno mengeluarkan Keppres No. 200/1960 yang isinya pemerintah membubarkan Partai Masyumi (Lihat lampiran 8). Sementara itu para tokoh partainya, baik itu yang terlibat peristiwa PRRI-Permesta maupun yang tidak, di kemudian hari mereka ditahan sebagai tahanan politik, antara lain Mohammad Natsir, Sjarifuddin Prawiranegara, Mohammad Roem, Prawoto Mangkusasmito, Isa Anshary, Yunan Nasution, Muchtar Ghazali dan EZ Muttaqien.

Pembubaran Partai Masyumi menimbulkan polemik pertanyaan besar, hal apa yang menyebabkan Presiden Soekarno begitu murka kepada Partai Masyumi. Seandainya jawabannya karena Partai Masyumi dianggap secara keseluruhan terlibat dalam PRRI-Permesta yang dicap oleh pemerintah sebagai pemberontak, terus kenapa sanksi serupa tidak ditimpakan terhadap PKI yang juga pernah terlibat pada pemberontakan Peristiwa Madiun 1948, apa motif dari sikap Soekarno berani membubarkan partai pemenang kedua Pemilu 1955 ini . Adakah hasutan dari PKI, yang notabene musuh besar Partai Masyumi, untuk merubah pandangan politik Soekarno terhadap Partai Masyumi, sebab masa Demokrasi Terpimpin adalah masa mesra kedekatan Soekarno dengan PKI dan blok komunisme umumnya.

Berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap konflik politik yang melibatkan antara Soekarno dengan Partai Masyumi pada era Demokrasi Terpimpin. Maka dari itu penulis terdorong untuk mengangkat penulisan skripsi ini dengan judul **“SIKAP POLITIK SOEKARNO TERHADAP PARTAI MASYUMI 1957-1960”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sikap Soekarno menghadapi kemacetan politik Demokrasi Liberal ?
2. Bagaimana sikap Soekarno terhadap Partai Masyumi pada masa Demokrasi Terpimpin ?
3. Bagaimana reaksi Partai Masyumi terhadap sikap politik Soekarno ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan sikap Soekarno mengatasi kemacetan politik Demokrasi Liberal.
2. Menjelaskan sikap Soekarno terhadap Partai Masyumi pada masa Demokrasi Terpimpin.
3. Menjelaskan reaksi Partai Masyumi terhadap sikap politik Soekarno.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pada mahasiswa maupun masyarakat umum, mengenai dinamika politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin, khususnya berkenaan sikap politik Soekarno terhadap Partai Masyumi di tahun 1957-1960. Rentang tahun yang menunjukkan tampilnya Soekarno sebagai pemimpin yang otoriter.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam pengembangan ilmu akademisi terutama dalam bidang sejarah politik Indonesia, dan diharapkan juga dapat dijadikan acuan untuk penelitian yang lebih lanjut dalam lingkup penelitian yang lebih luas dan mendalam.

E. Ruang Lingkup Penelitian.

Sebuah penulisan sejarah bila disusun untuk menjadi sebuah karya ilmiah sejarah, memerlukan adanya pembatasan ruang lingkup yang akan diteliti, dengan begitu pembahasannya tidak terlalu meluas dan hasilnya lebih akurat. Ruang lingkup temporal digunakan untuk membatasi waktu dalam penelitian penulisan, sehingga ada batasan waktu yang tegas. Dalam penulisan ini dibatasi dari tahun 1957 sampai tahun 1960. Tahun 1957 adalah awal dari persitegangan tajam antara Soekarno-Partai Masyumi, sebab di tahun ini Soekarno mengeluarkan Konsepsi Presiden yang secara tegas ditentang oleh Partai Masyumi. Sementara batasan akhir tahun 1960, merujuk pada riwayat

terakhir Partai Masyumi di panggung politik Indonesia (Orde Lama), karena pada tanggal 17 Agustus 1960 Presiden Soekarno mengeluarkan Keppres No.200/1960 yang memerintahkan Partai Masyumi membubarkan diri.

F. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu. Metode ini merupakan cara pemecahan masalah dengan menggunakan data atau peninggalan-peninggalan masa lalu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau secara imajinatif (Gottschalk, 1984 : 18).

Adapun tahapan-tahapan metode penelitian sejarah adalah sebagai berikut:

1. Heuristik merupakan kegiatan menghimpun jejak-jejak di masa lampau.

Kegiatan pengumpulan data atau heuristik meliputi kegiatan mencari dan menghimpun sumber-sumber sejarah termasuk bahan-bahan tertulis, tercetak serta sumber lain yang dirasa relevan dengan masalah yang diteliti. (Gottschalk, 1984 : 18) Sumber sejarah terbagi menjadi dua yakni :

Pertama, sumber primer yaitu sumber yang berdasarkan kesaksian dari seseorang saksi yang melihat dan mengalami pada kejadian tersebut.

Sumber primer yang dipakai dalam tulisan ini adalah :

- a. Arsip Lembaran Negara Republik Indonesia
- b. Harian Suara Merdeka yang terbit rentang tahun 1957-1960

Kedua, sumber sekunder yaitu sumber yang berdasarkan pada kesaksian siapapun yang bukan saksi pandangan mata yaitu seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. (Gottschalk, 1984 : 35). Untuk sumber sekunder diambil dari beberapa buku yang penulis kelompokkan berdasarkan kategori untuk masing-masing bahasan. Kategori untuk membedah ideologi politik dan sikap politik Soekarno penulis menggunakan buku referensi Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat, Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek, Bung Karno Wacana Konstitusi dan Demokrasi, Sosialisme Indonesia, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan UUD Negara Indonesia Dalam Lintasan Sejarah Dua Dasawarsa (1945-1965), Indonesian Communism Under Sukarno Ideologi dan Politik 1959-1965, Aidit Sang Legenda, Soebadio Sastroatomo Pengemban Misi Politik, Pergulatan Ideologi Partai Politik di Indonesia Nasionalisme-Islamisme Komunisme-Militerisme, Musso Si Merah di Persimpangan Republik, Sejarah Nasional Indonesia VI, Sukarno File, Soekarno Otoriter dan Indonesia Melawan Amerika 1953-1963. Kategori untuk membedah kiprah Partai Masyumi dan para tokohnya penulis menggunakan buku referensi API Sejarah 2, Politik Islam Anti Komunis Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal, Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965, Catatan Perjuangan HM Yunan Nasution, Sjarifuddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT, Jusuf Wibisono Karang di Tengah Gelombang, Islam dan Politik Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), 30 Tahun Indonesia Merdeka 1955-

1965, Sejarah Indonesia Modern. Sementara buku-buku untuk memberikan pemahaman keilmuan politik penulis menggunakan buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Pemikiran Politik Islam Indonesia, Pertautan Negara Khilafah Masyarakat Madani dan Demokrasi, Konsensus Nasional dan buku-buku yang memberikan pemahaman penelitian dan penulisan sejarah penulis menggunakan buku Mengerti Sejarah, Pengantar Ilmu Sejarah, Metodologi Sejarah.

Penulis dalam mengumpulkan sumber primer mendatangi Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Depo Arsip Harian Suara Merdeka. Di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah penulis mendapatkan Lembaran Negara Republik Indonesia yakni Lembaran Negara Republik Indonesia No.75 Tahun 1959 tentang Keputusan Dekrit Presiden Republik Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia No.149 Tahun 1959 tentang syarat-syarat dan peneyederhanaan partai, Lembaran Negara Republik Indonesia No.24 Tahun 1960 tentang pembaharuan susunan Dewan Perwakilan Rakyat, Lembaran Negara Republik Indonesia No.78 Tahun 1960 tentang susunan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Lembaran Negara Republik Indonesia No.79 Tahun 1960 tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai. Semua lembaran negara tersebut diperlukan untuk memperkuat informasi data dalam membangun tulisan ini. Sementara untuk mencari sumber primer dari surat kabar sezaman, penulis

mendatangi Depo Arsip Harian Suara Merdeka dan berhasil menghimpun arsip *softcopy* Harian Suara Merdeka yang terbit sepanjang rentang tahun 1957 sampai 1960. Mengumpulkan arsip *softcopy* sebanyak itu berguna untuk menganalisis perkembangan politik yang terjadi di Indonesia pada waktu itu, sehingga kita dapat mencari pengaruh keterkaitannya terhadap perubahan sikap politik Soekarno terhadap Partai Masyumi. Berkenaan dengan pengumpulan sumber sekunder, penulis mendatangi empat lokasi perpustakaan yakni; perpustakaan pribadi Boeng Zei, perpustakaan jurusan sejarah UNNES, perpustakaan pusat UNNES dan perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2. **Kritik Sumber**, adalah kegiatan untuk menilai, menguji atau menyeleksi jejak-jejak sejarah sebagai usaha untuk mendapatkan sumber yang benar, asli, dan relevan dengan kajian yang dibahas. Kritik sumber dimaksudkan untuk menentukan kredibilitas dari jejak sejarah (Widja, 1988 : 21). Pada tahap ini dilakukan kritik ekstern dan intern terhadap data yang telah berhasil dihimpun.
 - a. Kritik ekstern, yaitu kritik yang menilai apakah sumber yang didapat benar-benar merupakan sumber dikehendaki. Dilihat dari bentuknya sumber itu apakah asli atau turunan, selain itu berusaha menjawab pertanyaan tentang keotentikan keaslian sumber yang digunakan (Notosusanto, 1975 : 39). Pada umumnya sumber data yang terpenting dari penelitian ini adalah melalui kajian pustaka yang lebih difokuskan pada masalah sumber dokumen, arsip dan lain sebagainya yang

menyangkut masalah penelitian. Kritik ini untuk mendapatkan otensitas sumber dengan penelitian fisik terhadap sumber tersebut. Otensitas meliputi jenis fisik materi sezaman yang digunakan, antara lain jenis kertas, bahan, kualitas, tinta dan sebagainya.

Otensitas sumber primer dari surat kabar sezaman yakni Harian Suara Merdeka, setelah melalui proses kritik ekstern penulis menilai semua jenis materialnya mewakili zamannya. Sementara untuk arsip Lembaran Negara Republik Indonesia penulis menilai keotensitasannya material terbitannya dapat dipercaya karena merupakan bagian dari satu rangkuman buku yang diterbitkan oleh negara secara berkala.

- b. Kritik intern, yaitu kritik yang menilai sumber dilihat dari isinya apakah relevan dengan permasalahan yang ada dan dapat dipercaya keberadaannya. Cara melakukan kritik intern yaitu:
 - 1) Melakukan *cross chek* data antarsumber yang berhasil dikumpulkan.
 - 2) Melihat asal sumber, siapa yang menulis atau pengarangnya, apakah wartawan, ahli atau pengamat, praktisi, dosen, pelaku peristiwa atau institusi pemerintahan dan swasta. Maksud memperhatikan hal itu untuk dapat mempertimbangkan apakah sumber tersebut dapat diyakini kredibilitasnya atau tidak.
 - 3) Melihat kandungan data dari masing-masing sumber, apakah sumber yang diperoleh datanya relevan atau tidak dengan permasalahan.

- 4) Menyeleksi sumber-sumber yang diperlukan sesuai dengan pokok bahasan atau subpokok bahasan yang ditetapkan.
 - 5) Memperhatikan apakah sumber tersebut merupakan hasil penelitian, pengamatan atau observasi, laporan perjalanan atau tulisan pelaku.
- 3. Interpretasi**, yaitu tahapan untuk menafsirkan fakta-fakta sejarah serta membandingkan antara fakta satu dengan fakta yang lainnya, sehingga dapat ditetapkan makna dari fakta yang diperoleh untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam merangkai fakta-fakta sejarah, berpedoman pada susunan kerangka yang logis menurut urutan kronologis dengan tema atau topik yang jelas sehingga mudah dimengerti.
- 4. Historiografi**, yaitu proses mensintesis fakta atau proses menceritakan rangkaian fakta dalam suatu bentuk tulisan yang bersifat historis secara kritis analitis dan bersifat ilmiah berdasarkan fakta yang telah diperoleh.

G. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini dipergunakan beberapa pustaka untuk mengetahui seberapa jauh persolan penelitian tentang “Perubahan Sikap Politik Soekarno Terhadap Partai Masyumi, Dari Mitra Menjadi Musuh Politik 1957-1960”.

Buku pertama yang digunakan sebagai kajian dalam penelitian ini berjudul “*Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*”, buku semi otobiografi Soekarno ini ditulis oleh Cindy Adams, seorang wartawan Amerika Serikat yang ditugaskan oleh Pemerintah Indonesia untuk menyusun otobiografi Soekarno. Buku setebal 488 halaman ini diterbitkan oleh PT Gunung Agung,

edisi cetakan kedua tahun 1981. Buku ini memaparkan sepak terjang Soekarno mulai dari hal yang intim sampai pada persoalan makro kenegaraan.

Kelebihan dari buku ini adalah hasil dari wawancara Cindy Adams dengan Soekarno, oleh karena itu buku ini dirasa cukup mewakili gambaran figur Soekarno, termasuk soal pemikiran politik dan sikap politiknya. Kelemahannya kesan subjektivitas Soekarno cukup tinggi tetapi itu wajar karena buku ini adalah buku semi otobiografi.

Buku kedua yang digunakan sebagai kajian dalam penelitian ini berjudul "*Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*", buku ini disusun oleh enam sarjana ilmu politik yakni Nazaruddin Sjamsuddin, Isbodroini Suyanto, Toto Pribadi, Valina Singka Subekti, Chusnul Mar`iyah dan Frederika JE Agoes yang kesemuanya memusatkan diri membedah pemikiran Soekarno mengenai beberapa masalah politik, dan bagaimana pula ia mempraktekkan keyakinan politiknya. Buku setebal 247 halaman ini diterbitkan oleh Rajawali Pers cetakan pertama tahun 1988.

Kelebihan dari buku ini berhasil menampilkan fakta dan interpretasi tentang pemikiran dan tingkah laku politik seorang Soekarno pada masa ia aktif dalam panggung kehidupan politik dalam masyarakatnya. Kelemahannya buku ini tidak membedah secara mendalam konflik politik Soekarno dengan kelompok Islam modernis (Partai Masyumi), padahal konflik ini merupakan titik awal dari penurunan karir politik seorang Soekarno yang lebih memilih condong bermitra pada komunis, sampai akhirnya karir politiknya benar-benar berakhir bersamaan dengan hancurnya komunis di Indonesia.

Buku ketiga yang digunakan sebagai kajian dalam penelitian ini berjudul *“Islam dan Politik; Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)”*, buku ini ditulis oleh Dr. Ahmad Syafii Maarif, seorang pakar dan pengamat politik kenamaan Indonesia. Buku ini berasal dari tesis M.A. penulis (baca: Dr. Ahmad Syafii Maarif) di bidang kajian sejarah pada Ohio University, Athens, Ohio, Amerika Serikat. Buku setebal 218 halaman ini diterbitkan oleh Gema Insani Press, edisi cetakan kedua tahun 1996.

Buku ini memaparkan peta kekuatan politik Islam, termasuk Partai Masyumi, dalam kancah politik Demokrasi Terpimpin yang oleh penulis (baca: Dr. Ahmad Syafii Maarif) disebutkan sebagai era politik belah bambu kekuatan Islam oleh penguasa Orde Lama. Kelemahannya buku ini kurang menyoroti dinamika yang muncul di dalam tubuh Partai Masyumi saat ditinggal ketua umumnya yang memilih masuk ke dalam pergolakan PRRI/Permesta

Buku keempat yang digunakan sebagai kajian dalam penelitian ini berjudul *“Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965”*, buku ini ditulis oleh Prof. Deliar Noer seorang guru besar ilmu sejarah dari Universitas Indonesia. Buku setebal 479 halaman ini diterbitkan oleh Grafiti Pers, edisi cetakan pertama tahun 1987. Deliar Noer melakukan kajian mengenai sepak terjang dan pasang surutnya partai-partai Islam pada periode 1945-1965. Kajiannya ini membeberkan juga konflik-konflik yang terjadi, baik itu yang melibatkan intrapartai maupun antarpartai dan juga menjelaskan keterkaitan hubungan partai-partai Islam dengan penguasa. Kelemahan dari buku ini yakni tidak

memberikan informasi yang mendalam berkenaan hubungan Soekarno dengan umumnya tokoh-tokoh Islam modernis dan pandangan Soekarno terhadap ajaran serta gerakan Islam modernis di masa Demokrasi Terpimpin. Hal itu penting diketahui sebab Partai Masyumi merupakan partai representasi dari kalangan Islam modernis

Buku kelima yang digunakan sebagai kajian dalam penelitian ini berjudul "*API Sejarah 2*", buku ini ditulis oleh Prof. Ahmad Mansur Suryanegara. Mengenai penulis, beliau adalah seorang guru besar sejarah di Universitas Padjadjaran, Bandung. Buku setebal 578 halaman ini merupakan jilid kedua dari buku sebelumnya (*API Sejarah 1*). Buku yang diterbitkan oleh Salamadani ini cukup komplit dalam memaparkan kiprah ulama dan santri di panggung sejarah Indonesia, tidak terkecuali menjelaskan sepak terjang Partai Masyumi sebagai partai yang berplatform dan berbasis umat Islam. Buku ini dijadikan referensi dalam memandang sebuah peristiwa politik khususnya di era Demokrasi Terpimpin, dengan menggunakan sudut pandang kepentingan politik Islam di antaranya Partai Masyumi. Kelemahannya buku ini kental dengan kesan subjektivitas penulisnya yang lebih condong membela kepentingan dan kebesaran politik Islam dan terkadang menyudutkan hal-hal di luar itu tanpa penjelasan yang lebih terperinci.

Buku keenam yang digunakan sebagai kajian dalam penelitian ini berjudul "*Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*", buku ini ditulis oleh Ajip Rosidi seorang budayawan kenamaan yang juga memiliki perhatian besar dalam pengkajian sejarah. Buku setebal 471 halaman yang

diterbitkan Pustaka Jaya ini untuk pertama kalinya dicetak pada tahun 1986, namun dicetak ulang pada tahun 2011 dengan tiga judul buku lainnya yang semuanya sama berkaitan dengan Sjafruddin Prawiranegara (semuanya disusun oleh Ajip Rosidi) dalam rangka menyambut Satu Abad Mr.Sjafruddin Prawiranegara (1911-2011).

Buku ini berhasil menampilkan figur seorang Sjafruddin Prawiranegara baik sebagai pribadi maupun sebagai seorang tokoh politik terkemuka di Partai Masyumi. Sjafruddin Prawiranegara orang yang vokal berkonfrontasi dengan Soekarno di era demokrasi terpimpin. Ungkapan "*lebih takut kepada Allah SWT*" diambil dari ungkapan terkenal Sjafruddin Prawioranegara yang secara *implisit* menyatakan bahwa dirinya tidak takut pada Soekarno dengan kediktatoran yang ia miliki. Buku ini berhasil membongkar sikap politik para pemimpin Partai Masyumi yang memilih membangkang pada Soekarno dan Demokrasi Terpimpin.

Buku ketujuh yang digunakan sebagai kajian dalam penelitian ini berjudul *Catatan Perjuangan HM Yunan Nasution*, buku yang menulis biografi pimpinan Sekretaris Umum Partai Masyumi (1956-1960) ini ditulis oleh Badruzzaman Busyairi. Diterbitkan oleh Pustaka Panjimas Jakarta pada tahun 1985 dengan ketebalan buku 407 halaman. Buku ini berhasil mengungkap seluruh dinamika yang terjadi di dalam tubuh Partai Masyumi, terlebih di kurun waktu 1957-1960 rangkaian tahun yang merupakan masa-masa genting Partai Masyumi. Buku ini juga dilengkapi oleh lampiran dokumen-dokumen keputusan dan statemen Partai Masyumi terkait jawaban-

jawabanya pada penguasa Orde Lama, dan hal tersebut sangat membantu penulis dalam merangkai fakta dan data dalam penelitian ini.

Buku kedelapan yang digunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian ini berjudul *Jusuf Wibisono Karang di Tengah Gelombang*, buku yang menulis biografi mantan Menteri Keuangan masa Orde Lama dan juga tokoh politikus teras Partai Masyumi ini ditulis oleh Soebagijo IN. Diterbitkan oleh PT Gunung Agung Jakarta pada tahun 1980 dengan ketebalan buku 429 halaman. Buku ini berhasil mengungkap seluruh dinamika yang terjadi di dalam tubuh Partai Masyumi pada kurun waktu 1957-1960, yaitu masa-masa hubungan genting antara Partai Masyumi dengan Soekarno.

Kelebihan dari buku ini berhasil memberikan sudut pandang politik yang berbeda di antara politikus Partai Masyumi pada waktu itu. Jusuf Wibisono merupakan salah satu tokoh yang berlainan pendirian dengan tokoh-tokoh politikus Partai Masyumi lainnya, yang hampir sebagian besar solid menunjukkan sikap non kooperatif terhadap kebijakan dan kepemimpinan Soekarno. Bertolak belakang dengan garis perjuangan partai, Jusuf Wibisono adalah satu-satunya tokoh Partai Masyumi yang menunjukkan sikap hangat pada Soekarno dan menerima tawaran Soekarno untuk duduk menjadi anggota DPR GR lewat perwakilan golongan fungsional buruh, serta turut duduk dalam Pengurus Besar Front Nasional. Sikap pragmatis inilah yang kemudian berbuah pemecatan Jusuf Wibisono dari keanggotaan Partai Masyumi dan di cap sebagai pengkhianat partai. Penuturan terbuka Jusuf Wibisono dalam buku ini yang mengungkap semua latar belakang sikap yang dia ambil pada masa

lalu, menambah khazanah analisis berpikir penulis untuk membaca dinamika politik intern Partai Masyumi di tahun 1957-1960.

Buku kesembilan yang digunakan sebagai kajian dalam penelitian ini berjudul "*Politik Islam Anti Komunis, Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal*", buku ini ditulis oleh Samsuri seorang dosen dari Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Buku setebal 127 halaman ini sebagian besar berasal dari tesis dirinya saat menyelesaikan Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia di tahun 2000. Buku ini diterbitkan pada tahun 2004 oleh Safiria Insania Press, sementara di tahun yang sama penulisnya sedang menyelesaikan studi Islam di Program Doktor (S-3) Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Fokus penelitian penulis mengkaji sikap politik Soekarno terhadap Partai Masyumi, namun sejarah pergumulan politik Partai Masyumi dan PKI tidak boleh diabaikan, karena di saat Demokrasi Terpimpin digulirkan peta politik mengalami perubahan, PKI muncul dengan hegemoni besar dalam perpolitikan berbanding terbalik dengan Partai Masyumi yang dihadapkan pada konflik politik dengan Soekarno. Soekarno yang terpengaruh oleh PKI sementara PKI mempunyai dendam pada Partai Masyumi menyebabkan partai Islam terbesar ini menjadi bulan-bulanan pukulan politik sampai akhirnya hegemoni kebesaran partai ini berakhir di bulan Agustus 1960 ketika Soekarno memutuskan membubarkan Partai Masyumi..

Sementara Lembaran Negara Republik Indonesia yang digunakan untuk mendukung penulisan ini antara lain adalah :

Pertama, Lembaran Negara Republik Indonesia No.75 Tahun 1959 tentang keputusan Dekrit Presiden kembali kepada UUD 1945. Digunakan untuk memberikan gambaran tegas sikap intervensi Soekarno dalam menghadapi kemacetan politik di parlemen dan kosntituante.

Kedua, Lembaran Negara Republik Indonesia No.149 Tahun 1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian. Lembaran Negara ini berguna untuk meninjau dasar kebijakan politik Soekarno dalam mengancam atau mengikis partai-partai yang menjadi musuh politiknya.

Ketiga, Lembaran Negara Republik Indonesia No.24 Tahun 1960 tentang pembaharuan susunan Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaran negara ini untuk memberikan gambaran alasan-alasan Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilu tahun 1955.

Keempat, Lembaran Negara Republik Indonesia No.78 Tahun 1960 tentang susunan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Lembaran negara ini memberikan gambaran kebijakan pemerintahan Soekarno yang secara otoriter mengatur komposisi keanggotaan di parlemen, pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota parlemen, pengaturan tata tertib parlemen .

Kelima, Lembaran Negara Republik Indonesia No.79 Tahun 1960 tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai. Lembaran negara ini memberikan pemahaman pemerintahan otoriter Soekarno yang secara terbuka memberikan ruang untuk menghabisi partai yang menjadi lawan politiknya.

BAB II
KONSEPSI PRESIDEN : SOLUSI KEMACETAN POLITIK
DALAM KEMELUT PRO KONTRA

A. Latar Belakang Lahirnya Konsepsi Presiden

Sejak pertama kalinya Demokrasi Liberal digulirkan pada tanggal 14 November 1945, sampai kemudian mendapatkan penetapan konstitusional melalui UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara) yang menegaskan demokrasi Indonesia berhaluan liberal dengan sistem pemerintahan bersifat parlementer (Budiardjo, 1989 : 69). Bangsa Indonesia belum pernah sekalipun memiliki pemerintahan yang kuat dalam arti bertahan sampai akhir masa kerja periodenya (satu masa kerja kabinet lima tahun), sebut Kabinet Sjahrir I (4 November 1945-12 Maret 1946), Kabinet Sjahrir II (12 Maret -2 Oktober 1946), Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946-27 Juni 1947), Amir Sjarifoeddin I (3 Juli 1947-23 Januari 1948), Amir Sjarifoeddin II (24 Januari-September 1948), Hatta I (September-22 Desember 1948), Sjafruddin Prawiranegara (kabinet PDRI 22 Desember 1948-13 Juli 1949), Hatta II (14 Juli-15 Desember 1949), Hatta III (kabinet RIS 20 Desember 1949-8 September 1950), Natsir (9 September 1950-20 Maret 1951), Sukiman (April 1951-Februari 1952), Wilopo (April 1952-Juni 1953), Ali Sastroamijoyo (Juli 1953-Juli 1955), Boerhanoeddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956) yang semua kabinet itu tidak menunjukkan periode yang efektif dalam menjalankan masa tugasnya (Suryanegara, 2010 : 229-356)

Hal ini disebabkan oleh sifat dari era Demokrasi Liberal itu sendiri yang memberikan ruang dominannya peran partai-partai politik dalam mengatur jalannya roda pemerintahan, karena fragmentasi partai-partai politik setiap kabinet berdasarkan koalisi yang berkisar pada satu atau dua partai besar dengan beberapa partai kecil. Namun kenyataannya koalisi yang dibangun sering kurang mantap dan partai-partai politik dalam koalisi tidak segan-segan untuk menarik dukungannya sewaktu-waktu, sehingga kabinet seringkali jatuh karena keretakan dalam koalisi sendiri. Dengan demikian timbul kesan bahwa partai-partai politik dalam koalisi kurang dewasa dalam menghadapi tanggungjawab mengenai permasalahan pemerintahan. Di sisi lain pihak partai-partai politik dalam barisan oposisi tidak mampu untuk berperan sebagai oposisi yang konstruktif yang menyusun program-program alternatif, tetapi hanya menonjolkan segi-segi negatif dari tugas oposisi (Budiardjo, 1989 : 70).

Soekarno mengungkapkan bahwa perilaku negatif dari oposisi itu ialah sedapat mungkin menumbangkan pemerintahan yang ada diganti dengan pemerintah daripada oposisi itu sendiri (Rahardjo, 2001: 168) Akibatnya kabinet-kabinet yang berdiri pada umumnya hanya berumur pendek, tidak dapat bertahan lebih lama dari rata-rata delapan bulan, dan hal ini menghambat perkembangan ekonomi dan politik oleh karena pemerintah tidak dapat kesempatan untuk melaksanakan program-programnya. Sikap partai-partai politik yang demikian menyebabkan kemacetan konstalasi politik di parlemen.

Lebih parahnya lagi kemacetan politik tidak hanya terjadi di parlementer, tetapi juga menjalar di Majelis Konstituante yakni anggota-anggota partai-partai politik yang tergabung dalam Majelis Konstituante tidak mampu mencapai konsensus mengenai dasar negara dan undang-undang dasar baru (Budiardjo, 1989 : 70) Seluruh anggota Majelis Konstituante berjumlah 542 orang, tetapi tidak ada satu fraksi pun yang berhasil mencapai dua pertiga dari jumlah tersebut untuk memenuhi prosedur penetapan UUD yang sah. Pancasila, Islam dan Sosial Ekonomi adalah tiga nama yang diusulkan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia nantinya.

Usul yang pertama Pancasila didukung oleh PNI dengan 116 anggota, PKI termasuk Fraksi Republik Proklamasi 80 anggota, Parkindo 16 anggota, PSI 10 anggota, IPKI 8 anggota dan partai-partai kecil lainnya dengan total berjumlah 273 orang. Usul kedua Islam didukung oleh Partai Masyumi 112 anggota, Partai NU 91 anggota, PSII 16 anggota, Perti 7 anggota, dan partai-partai kecil lainnya dengan total berjumlah 230 anggota. Usul ketiga Sosial Ekonomi didukung oleh Partai Buruh 5 anggota dan Partai Murba 4 anggota, total berjumlah 9 orang (Widjaja, 1989 : 31-32)

Dalam pengamatan Soekarno kemacetan politik yang melanda Indonesia lebih kompleks lagi, tidak sekedar melihat kemacetan di permukaan yang terjadi di parlemen maupun Majelis Konstituante, tetapi menjurus pada keadaan krisis yang komprehensif yakni mulai dari pucuk

pemerintahan sampai masyarakat luas. Menurut Soekarno Indonesia terjerembab ke dalam lima macam krisis. Pertama, krisis politik di mana banyak orang tidak lagi percaya pada demokrasi. Kedua, adanya krisis dalam aparatur negara yang berkaitan dengan penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat. Ketiga, krisis dalam cara masyarakat berpikir. Keempat, krisis moral dan yang kelima adalah krisis kewibawaan (Sjamsuddin, 1988 : 19)

Kondisi yang tidak stabil ini berdampak pada terkatung-katungnya cita-cita revolusi Indonesia yang ingin membawa bangsa Indonesia sejajar di depan bangsa-bangsa lainnya dan lebih dari itu ingin menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dari negara-negara dunia ketiga sesuai dengan ambisi penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di kota Bandung, Indonesia. Sayangnya para tokoh politik partai tidak lagi memiliki konsen pada cita-cita itu, mereka sibuk mengurus permasalahan domestiknya sendiri-sendiri. Persatuan nasional yang seharusnya dipupuk sebagai modal gerak juang revolusi justru sebaliknya digerogeti oleh sikap menonjolkan kepentingan golongan dan primordialisme agama serta kesukuan.

Setelah lebih 11 tahun Demokrasi Liberal digulirkan (1945-1956), kekecewaan Soekarno terhadap sistem ini semakin memuncak ketika badai krisis politik tidak juga mau beranjak. Belum dewasanya kesadaran bernegara dan berbangsa dari para tokoh politik partai, membuat ajang Demokrasi Liberal menjadi ajang pertempuran kepentingan politik

golongan atau kelompok. Dengan kata lain bangsa Indonesia pada waktu itu belum siap untuk mengecap demokrasi yang sesungguhnya, yakni demokrasi dalam arti hakikat liberal.

Di lain pihak Soekarno menyatakan bahwa Demokrasi Liberal tidak cocok dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia karena demokrasi liberal adalah demokrasi impor. Kemacetan politik yang melanda Indonesia tidak lain adalah ekses-ekses yang ditimbulkan dari penyelenggaraan demokrasi yang bukan demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa (Rahardjo, 2001 : 168). Absahnya kehadiran oposisi dalam penyelenggaraan Demokrasi Liberal dinilai Soekarno sebagai pengganggu dari pembangunan solidaritas dan stabilitas pemerintahan. Pengertian dangkal dari sikap beroposisi menjadi *preseden* tidak sehat dalam kehidupan berpolitik Indonesia, bergugurannya kabinet-kabinet dalam waktu relatif pendek adalah ekses buruk nyata dari sikap kekurangdewasaan politisi partai.

Melihat kenyataan berpolitik seperti ini, Soekarno tidak hanya berpangku tangan sembari mengutuki keadaan. Sebagai orang yang mengklaim bahwa hanya dirinyalah yang sanggup memberikan keagungan kepada bangsa Indonesia. Soekarno bersikeras mencari solusi dari kemacetan politik yang ada. Melalui konsep Demokrasi Terpimpin ia mencela Demokrasi Barat yang liberalistis yang menyebabkan tak mampu membentuk sebuah pemerintahan yang kuat yang dibutuhkan Indonesia

untuk membangun jalannya revolusi. Secara eksplisit Soekarno menyatakan :

Demokrasi yang saya dambakan untuk Indonesia bukanlah demokrasi liberal seperti yang terdapat di Eropa Barat. Tidak! Apa yang saya inginkan untuk Indonesia adalah suatu demokrasi terpimpin, suatu demokrasi dengan pimpinan. Demokrasi terpimpin, demokrasi terpimpin, sesuatu yang dipimpin tetap demokrasi. (Karim, 1983 : 141)

Jelas sekali bahwa konsep demokrasi yang Soekarno inginkan adalah demokrasi yang dipimpin oleh kepemimpinan kuat. Demokrasi yang bukan sebebaskan-bebasnya orang berkehendak melainkan ada sebuah kepemimpinan yang dapat mengendalikan kebebasan agar kebebasan itu tidak menjadi tindakan kebablasan yang dapat merugikan bangsa dan negara.

Selain itu sistem multipartai yang menjadi ruh dari Demokrasi Liberal tidak luput dari sorotan kritik Soekarno. Sebelumnya di bulan Oktober 1956 Presiden Soekarno mengemukakan keinginannya untuk penguburan partai-partai yang terlampau banyak (40 partai politik tumbuh di Indonesia), Soekarno merasa bahwa keberadaan multipartai di Indonesia tidak sama sekali membuat jalannya demokrasi menjadi sehat malah merusak tatanan demokrasi. Hal itu implisit dipetik dari ungkapan Soekarno yang menyatakan :

Banyak dari partai-partai itu tidak menunjukkan perbedaan-perbedaan besar yang prinsipil. Partai-partai itu sangat boleh jadi hanya disebabkan oleh nafsu menonjolkan diri dari beberapa orang yang merasa kurang mendapat perhatian masyarakat. Nafsu ingin berpengaruh “dia mau kursi” bukan demokrasi (Sjamsuddin (ed) Isbodroini Suyanto, 1988 : 82)

Dengan sistem partai kita mengalami kemacetan total. Itu tidak sehat; harus dirombak sama sekali. Penyakit inilah yang menyebabkan kita selalu cakar-cakaran satu sama lain. Karena itu sekarang marilah kita bersama-sama mengubur semua partai (Karim, 1983 : 140-141)

Pernyataan Presiden Soekarno itu mendapatkan kritik tajam dari Natsir, Ketua Umum Partai Masyumi, balas menanggapi :

Selama demokrasi masih ada, selama itu pula partai-partai terus ada, dengan atau tidak dengan keputusan pemerintah. Selama masih ada kebebasan partai, selama itu pula demokrasi ditegakkan. Kalau demokrasi dikubur, demokrasi pun otomatis akan dikubur, dan di atas kuburan itu hanya diktator yang akan memerintah (Noer, 1987 : 354)

Menurut Partai Masyumi demokrasi bukan semata-mata cara yang dapat dirubah setiap waktu menurut keadaan, demokrasi adalah sebagai jalan atau pandangan hidup. Sementara menanggapi kemacetan politik yang melanda di parlemen dan Majelis Konstituante, Partai Masyumi berpendapat bahwa implementasi demokrasi sebagai suatu sistem terkadang sukar oleh sebab itu menuntut pengalaman dan harus pula melalui berbagai cobaan yang kadang-kadang pahit. Maka dari itu Partai Masyumi tidak menyalahkan sistem Demokrasi Liberal atau multipartai, melainkan penekanan pada koreksi diri dari tokoh-tokoh partai politik yang menjadi biang kemacetan politik. Untuk itu Natsir menegaskan:

Bahwa salah satu syarat demokrasi ialah bahwa pendukungnya harus memakai partai sebagai alat menurut peraturan yang wajar dan bahwa para pendukung ini harus jujur menegakkan nilai-nilai yang berharga dalam hidup. Jangan sebaliknya alat-alat itu yang dijadikan tujuan dengan menginjak nilai-nilai hidup (Noer, 1987 : 354)

Sejak awal pembentukannya, Partai Masyumi memang tetap kukuh bersikap bahwa prinsip pemerintahan yang paling sesuai dengan Islam dan masyarakat Indonesia adalah demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Walaupun demikian, sebab Partai Masyumi berazaskan Islam, partai mengharapkan cita-cita pelaksanaan kedaulatan rakyat harus dilakukan dengan berpedoman kepada sya`riat. Agar cita-cita kehidupan berdemokrasi bernegara itu sesuai dengan sya`riat maka Partai Masyumi memperjuangkan tujuannya dengan menempuh jalan yang konstitusional yakni Partai Masyumi mengajukan sya`riat Islam sebagai dasar negara dan undang-undang dasar dalam konsensus nasional di Majelis Konstituante di samping berusaha untuk menguasai kursi di parlemen.

Walaupun Partai Masyumi mengusung ideologi Islam, namun pandangan Partai Masyumi mengenai kehidupan sosial dan kesadaran keragaman masyarakat Indonesia sangatlah positif, sehingga konsep demokratis diterima dengan baik. Partai Masyumi bahkan disebut sebagai partai politik pembela demokrasi, artinya antara konsep dan praktiknya berjalan bersama. Hal itu terbukti dengan ngototnya Partai Masyumi untuk mempertahankan tatanan Demokrasi Liberal yang dianggapnya sebagai sistem yang benar-benar demokratis.

Meski mendapat kritik dari beberapa pihak, ide Demokrasi Terpimpin itu tetap dijawantahkan ke dalam Konsepsi Presiden yang diumumkan pada tanggal 21 Februari 1957. Soekarno berani menyodorkan ide tersebut didorong oleh rasa kepercayaan dirinya bahwa rakyat

Indonesia meminta Soekarno untuk mengambil alih dalam mengatasi kemacetan politik yang mengakibatkan krisis pemerintahan, Soekarno mengutarakan :

Di mana-mana saya datang, keluhan daripada rakyat yang kecil ialah : “Bapak, apakah bapak tidak dapat mengadakan perdamaian nasional ? Apakah bapak tidak mengadakan satu sistem agar kita ini semuanya bergotong royong ?” (Rahardjo, 2001 : 175)

Konsepsi Presiden pada prinsipnya mengandung tiga hal pokok di dalamnya. Pertama, akan diperkenalkannya gaya kepemimpinan dan sistem pemerintahan baru yang dikenal dengan sistem Demokrasi Terpimpin. Kedua, mengusulkan pembentukan kabinet gotong royong yang meliputi seluruh wakil partai yang ada di parlemen, termasuk PKI. Ketiga, dibentuknya Dewan Nasional yang terdiri dari sebagian besar golongan fungsional (Sjamsuddin (ed), Chusnul Mar`iyah, 1988 : 176).

Konsepsi Presiden itu kemudian menimbulkan pro kontra, partai-partai seperti PNI, PKI, Baperki dan Murba menyokongnya dengan serta merta berupa pernyataan-pernyataan tercetak, rapat-rapat umum, pengiriman delegasi dan lain-lain. Sedangkan partai-partai agama, seperti Partai Masyumi, Partai NU, PSII dan Partai Katholik menolaknya karena menganggap bahwa konsepsi itu menyinggung masalah yang fundamental bertalian dengan susunan ketatanegaraan yang seharusnya menjadi wewenang Konstituante (Rosidi, 2011 : 199)

Di sisi lain Soekarno merasa yakin bahwa konsepsinya mendapat dukungan dari golongan militer. Hal ini didasari bahwa golongan militer

telah lama menyimpan keresahan pada praktek Demokrasi Liberal yang hanya membawa bangsa pada keadaan yang *chaos*. Sebelumnya di bulan Oktober 1952, ketika Angkatan Darat di bawah pimpinan KSAD Kolonel AH Nasution membawa demonstrasi militer di depan Istana Negara mendesak Presiden Soekarno membubarkan parlemen dan mengambil alih kekuasaan. Meskipun pada waktu itu Soekarno menolak untuk melakukan hal itu dengan dasar pertimbangan bahwa apabila ia memenuhi tuntutan mematikan sistem demokrasi dengan pasukan bersenjata dapat berdampak buruk pada citra dan simpati terhadap Indonesia di dunia internasional yang pada waktu itu tengah berjuang melalui meja diplomasi untuk mengembalikan Irian Barat. Namun dari peristiwa Oktober 1952 itu Soekarno dapat menyimpulkan bahwa militer merasakan keresahan yang sama seperti yang ia rasakan yakni menentang sistem pemerintahan Demokrasi Liberal yang parlementer, dan dengan pasti Soekarno berkeyakinan bahwa Konsepsi Presiden yang bakal merubah sistem pemerintahan yang ada didukung oleh golongan militer

Konsepsi ini jelas hendak menampung keinginan Presiden Soekarno yang sebelumnya pernah menyatakan ketidakpuasannya dengan kedudukan presiden yang menurut UUDS yang berlaku pada waktu itu, tidak mempunyai kekuasaan langsung dalam pemerintahan, karena pemerintahan diselenggarakan oleh Perdana Menteri dan para menteri yang harus bertanggung jawab kepada parlemen (Rosidi, 2011 : 198) Sementara untuk opini dunia internasional pengambil alihan sistem

pemerintahan dari Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin sekarang ini tidak lagi menjadi soal yang dapat merusak citra dan simpati dunia internasional, terutama Barat, terhadap perjuangan Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat dari cengkeraman Belanda. Sebab Soekarno tidak lagi mengharapkan Barat dapat luluh menjembatani pengambil alihan Irian Barat di forum diplomasi PBB, karena Soekarno melihat Barat tidak memiliki niatan baik untuk mendesak Belanda agar segera mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Selain itu keberhasilan Indonesia dalam menghimpun negara-negara Asia Afrika di KAA tahun 1955 dengan agenda mengganyang segala bentuk imperialisme kolonialisme menjadi modal bagi Indonesia apabila sewaktu-waktu Irian Barat diambil alih paksa melalui cara operasi militer, sebab pendudukan Belanda di Irian Barat termasuk bentuk imperialisme kolonialisme.

Melalui cara meluluskan Konsepsi tersebut Soekarno merasa yakin dapat menjadi batu loncatan untuk menggapai kekuasaan memimpin secara totaliter, yang berarti Soekarno mendapatkan keleluasaan untuk menumpahkan segala ambisi revolusionernya yakni mewujudkan Indonesia menjadi negara yang sosialis dan Indonesia menjadi kampiun dalam usaha-usaha memerangi imperialisme kolonialisme kapitalisme global.

Demi menumpahkan ambisi revolusionernya itu, kebutuhan untuk merangkul golongan komunis pun menjadi kepentingannya yang mendesak. Seperti yang diungkapkan Presiden Soekarno di depan

pemuka-pemuka partai yang hadir di Istana Negara di malam pengumuman Konsepsi, Presiden Soekarno mengatakan :

Saya bertanya dengan setenang-tenangnya saudara-saudara, apakah kita dapat terus menerus mengabaikan satu golongan yang di dalam pemilihan umum mempunyai suara 6 juta manusia ? Sungguh saudara-saudara saya tidak memihak, saya sekedar menghendaki adanya perdamaian nasional. Saya sekedar ingin mengadakan cara pemerintah gotong-royong dengan tidak memihak sesuatu pihak (Rahardjo, 2001 : 173).

Di samping ingin mewujudkan cita-cita perdamaian nasional, maksud Presiden Soekarno merangkul PKI adalah karena Soekarno sadar betul kalau PKI merupakan kekuatan riil yang mendukung ambisi-ambisi revolusionernya. Baik Soekarno dan PKI memiliki kesamaan orientasi ambisi yakni menengahkan imprealisme kapitalisme di muka bumi dengan menggalang kekuatan semua rakyat yang tertindas, bangsa-bangsa yang tejajah yang mencintai kemerdekaan nasional, demokrasi rakyat dan perdamaian dunia (Sd, 1996 : 40-41). Di tambah cita-cita Soekarno yang ingin mewujudkan Indonesia menjadi negara sosialis mendapat sambutan hangat dari penganut paham kiri (ideologi sosialis dan komunis), dan cita-cita Soekarno itu semua bisa segera terwujud jika dia berhasil mengkonsolidasikan kekuatan progressif revolusioner untuk berada di belakang barisannya, kekuatan progressif revolusioner itu tidak lain adalah PKI.

Seperti yang Soekarno ungkapkan bahwa dia telah lama menyimpan keaguman pada cara-cara perjuangan PKI yang radikal, yang kemudian disebutnya sebagai progressif revolusioner, yakni cara perjuangan yang

dipercayai Soekarno dan yang sesuai dengan jiwanya, dan itu pula watak perjuangan yang senantiasa dianjurkan Soekarno dalam hampir setiap pidatonya (Sjamsuddin, 1988 : 28). Maka atas dasar pertimbangan itu Soekarno bersikeras memperjuangkan masuknya PKI mengambil bagian di kabinet.

Selain menganjurkan untuk dibentuknya kabinet gotong royong yang di mana PKI dilibatkan di dalamnya. Presiden Soekarno pun merasa perlu untuk membentuk Dewan Nasional. Dewan Nasional ini nantinya tersusun dari orang-orang golongan-golongan yang fungsional di dalam masyarakat seperti kaum buruh, tani, pemuka agama, pengusaha, cendekiawan, kepala staff angkatan-angkatan bersenjata, jaksa agung dan lainnya. Fungsi dari Dewan Nasional ini ialah memberi nasihat kepada kabinet baik diminta maupun tidak. Susunan orang-orang yang duduk di Dewan Nasional diatur sendiri oleh Presiden Soekarno yang mengangkat dirinya sebagai pimpinan Dewan Nasional (Rahardjo, 2001 : 171-172) Melalui kedudukannya sebagai Ketua Dewan Nasional, Soekarno dapat turut mempengaruhi jalannya pemerintahan, tetapi tanpa tanggung jawab, karena yang harus bertanggung jawab kepada parlemen adalah Dewan Menteri sebagai penyelenggara pemerintahan (Rosidi, 2011 : 199)

B. Implementasi Konsepsi Presiden

Kondisi politik yang memburuk mengharuskan Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo mundur dari kabinetnya pada 14 Maret 1957. Presiden

Soekarno kemudian menunjuk Soewirjo, Ketua Umum PNI, untuk melakukan formatur kabinet. Namun ternyata mengimplementasikan Konsepsi Presiden untuk membentuk kabinet gotong royong yang menyertakan PKI di dalamnya tidak berhasil, sebabnya partai-partai Islam terutama Partai Masyumi tidak mau duduk bersama dengan PKI di kabinet. Menurut Natsir, faktor prinsipil yang dikedepankan Partai Masyumi untuk menolak PKI masuk kabinet adalah karena PKI tidak menghormati agama. Partai Masyumi berkeyakinan bahwa sangat tidak mungkin PKI yang dalam ajaran komunisnya menganut paham atheis dapat menerima sila Ketuhanan Yang Maha Esa dari Pancasila (Samsuri, 2004 : 62) Sikap Partai Masyumi yang menolak PKI dalam kabinet bertentangan dengan gagasan Presiden Soekarno yang mengharapkan kabinet pengganti Ali Sastroamijoyo adalah kabinet gotong royong yang ditopang oleh empat partai besar (PNI, Partai Masyumi, Partai NU, PKI). Sementara Partai NU menolak rencana Soewirjo bila kabinetnya tanpa keikutsertaan Partai Masyumi. Sikap keras partai-partai Islam, terutama Partai Masyumi, membuat Soewirjo gagal untuk membentuk kabinet baru.

Kegagalan ini kemudian dimanfaatkan oleh Soekarno untuk membentuk sendiri kabinet baru. Pada tanggal 4 April 1957, diadakan rapat di Istana Negara yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin partai dan pejabat senior. Dalam rapat tersebut, Soekarno mengumumkan mengangkat dirinya sendiri sebagai formatur kabinet baru. Selang empat

hari, Soekarno telah berhasil membentuk kabinet baru di bawah pimpinan Juanda seorang tokoh non partai fungsional (Suryanegara, 2010 : 373)

Kabinet baru yang dibentuk oleh Soekarno ini diberi nama Kabinet Karya. Kabinet ini tidak sesuai dengan rencana Konsepsi Presiden tentang kabinet gotong royong yang ditopang empat partai besar. Menteri-menteri yang bersedia memangku jabatannya didasarkan atas keinginan pribadi bukan mengatasnamakan wakil dari partai-partai politik, misal Mr. Hardi yang merupakan tokoh PNI menjabat Wakil Perdana Menteri I atas nama pribadi begitupula Idham Chalid, Ketua Umum Partai NU, menjabat Wakil Perdana Menteri II atas nama pribadi (Suryanegara, 2010 : 373). Meskipun tokoh Partai NU melunak untuk di kabinet baru tapi tokoh-tokoh Partai Masyumi tetap bersikeras tidak mau duduk di kabinet baru walaupun tanpa kehadiran tokoh PKI di dalamnya, Partai Masyumi menuduh bahwa kabinet ini inskonstitusional dan boneka dari Soekarno

Soekarno beralih maksud dari mengangkat tokoh-tokoh partai di kabinet tapi tidak dengan mengatasnamakan partainya adalah cara untuk menghindarkan kebijaksanaan politik pemerintahan dari kepentingan partai politik yang ada (Sjamsuddin (ed), Chusnul Mar`iyah, 1988 : 191). Menurut Ahmad Mansur Suryanegara (2010 : 373) praktik cara memisahkan orang-orang partai yang diangkat menjadi menteri, dengan tidak mengatasnamakan dirinya sebagai pimpinan atau wakil partainya adalah cara Soekarno untuk mengkebiri wibawa pemimpin atau wakil partai politik yang keberadaannya dipertahankan hanya sebatas pajangan.

Soekarno pada dasarnya hanya menjadikan Kabinet Karya atau Kabinet Juanda sebagai batu loncatan atau masa transisi sebelum dia merengkuh kekuasaan seutuhnya. Dalam kabinet ini dibentuk jaringan-jaringan yang memperkuat solidaritas penopang Soekarno kelak membangun Demokrasi Terpimpin. Dewan Nasional yang berhasil dibentuk pada bulan Mei 1957, pada perkembangannya menjadi alat *counter attack* terhadap peranan partai-partai politik. Hal ini disebabkan peranan Dewan Nasional ini sepenuhnya tergantung kepada Soekarno dan oleh Soekarno dimanfaatkan sebagai alat strategi untuk menembus langkah penataan sistem kepartaian. Hal itu terbukti dalam sidang Dewan Nasional tanggal 14-15 Agustus 1958 dibuatlah rancangan usulan Dewan Nasional kepada kabinet. Rancangan usulan itu antara lain, pertama membentuk DPR baru yang terutama terdiri dari golongan fungsional, kedua, merancang sistem kepartaian yang baru dengan mengusulkan mencabut Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang multipartai untuk digantikan dengan undang-undang kepartaian baru yang memperkenankan partisipasi golongan fungsional (Sjamsuddin (ed), Chusnul Mar`iyah, 1988 : 187)

C. PRRI Bentuk Lain Sikap Oposisi Beberapa Tokoh Partai Masyumi

Di tahun 1957 situasi perpolitikan Indonesia berada dalam keadaan krisis yang pelik. Perpecahan antarpartai politik dan perpecahan di kalangan militer, berdampak di daerah, timbul Gerakan Militer Daerah

melawan pemerintah pusat seperti Dewan Banteng di Sumatera Barat dipimpin Letnan Kolonel Ahmad Husein, Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin Kolonel M Simbolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin Letnan Kolonel Berlian dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara dipimpin Letnan Kolonel Samual (Suryanegara, 2010 : 375) Dalam keadaan politik seperti ini kekuatan-kekuatan politik mengambil inisiatif. Partai Masyumi yang mempunyai basis kuat di daerah-daerah luar Jawa dan dengan sikapnya yang berposisi terhadap Presiden Soekarno memberikan simpatinya terhadap gerakan-gerakan daerah (Sjamsuddin (ed), Chusnul Mar`iyah, 1988 : 173).

Menanggapi Dewan-Dewan Militer di Sumatera, Sjafruddin Prawiranegara, anggota Pengurus Besar Partai Masyumi, menyatakan menyimpan harapan bahwa gerakan-gerakan daerah di Sumatera akan memberikan alternatif bagi perkembangan demokrasi di tanah air. Dia menganggap bahwa situasi yang makin memburuk itu disebabkan juga oleh sikap Soekarno yang ingin menumpuk kekuasaan di tangannya sendiri dengan bantuan orang-orang komunis, tanpa disadarinya bahwa pada suatu waktu orang komunis akan menyingkirkannya juga. Dengan melakukan tekanan-tekanan dari luar Jawa, Sjafruddin berharap akan dapat menyadarkan Presiden Soekarno bahaya main-main dengan orang komunis (Rosidi, 2011 : 317)

Pernyataan Sjafruddin Prawiranegara berlandas pada tuntutan dari perwira-perwira Gerakan Militer Daerah yang disusun di Palembang pada

tanggal 7 dan 8 September oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein dari Sumatera Barat, Letnan Kolonel Ventje Sumual dari Sulawesi Utara, dengan Letnan Kolonel Barlian sebagai tuan rumah. Hasil pertemuan ketiga perwira itu melahirkan pernyataan politik yang disebut Piagam Palembang (Rosidi, 2011 : 315) , isinya antara lain :

1. Kembalinya Hatta pada kepemimpinan nasional.
2. Membersihkan pimpinan Angkatan Bersenjata dari simpatisan komunis, dan Mayor Jenderal AH Nasution harus segera diganti.
3. Desentralisasi bentuk dan susunan pemerintahan, memberikan otonomi yang lebih luas pada daerah-daerah.
4. Pembentukan Senat untuk membela kepentingan daerah dalam pemerintahan.
5. Melarang ideologi komunisme sebab bertentangan dengan Pancasila.

Kemungkinan untuk melakukan tekanan terhadap Soekarno dari luar Jawa, tidaklah mustahil, karena sumber-sumber alam yang menjadi andalan devisa negara kebanyakan terdapat di luar Jawa, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Maka kalau para pemimpin daerah-daerah yang bergolak itu bersatu dan sepakat untuk melakukan tindakan, Presiden Soekarno dapat didesak agar mau melangkah surut dengan membubarkan Kabinet Karya yang dibentuk secara tidak sah karena ditunjuk oleh formatur Soekarno sebagai warga negara yang diangkat oleh Soekarno sebagai presiden. Kemudian dapat dibentuk sebuah kabinet yang kuat dengan Perdana Menteri Hatta dan Sultan Hamengku Buwono IX sebagai

Wakil Perdana Menteri. Karena sesungguhnya yang diperlukan adalah sebuah pemerintahan yang kuat serta cakap, menunjang pembangunan daerah-daerah dan sadar pula akan bahaya komunisme yang kian mengancam (Rosidi, 2011 : 317). Adapun alasan dipilih Hatta karena Hatta adalah figur salah seorang proklamator yang diyakini banyak orang sebagai satu lambang persatuan nasional selain itu Hatta juga merupakan figur yang anti komunis. Sementara Sultan Hamengku Buwono IX merupakan figur kharismatik sebagai lambang masyarakat Jawa, yang secara kalkulasi politik menyimpan demografis politik dominan.

Tekanan-tekanan politik di Jakarta membuat gerah tokoh-tokoh Partai Masyumi, di tambah pasca Peristiwa Cikini di mana semua mata fitnah tertuju pada Partai Masyumi, partai yang menadapat stigma vokal keras beroposisi terhadap pemerintahan. Atas dasar kemanan sebab beberapa tokoh Partai Masyumi merasa dirinya tidak aman tinggal di Jakarta karena hampir setiap hari diteror dan diintimidasi oleh golongan pemuda tak dikenal (Gafar, 2006 : 62). Akhirnya di rentang bulan Desember 1957 dan Januari 1958 beberapa tokoh teras partai memutuskan untuk meninggalkan Jakarta menuju Padang. Sebelumnya kepergian Sjafruddin Prawiranegara, Natsir, Boerhanoeddin Harahap dan lain-lain tokoh pemimpin Partai Masyumi ke Sumatera, tidak pernah dibicarakan dalam sidang partai. Meskipun Natsir ketika itu menjadi Ketua Umum Partai Masyumi, dan Sjafruddin Prawiranegara serta Boerhanoeddin Harahap juga duduk sebagai anggota Pengurus Besar partai, tetapi

keberangkatan mereka ke Sumatera bukanlah suatu kebijaksanaan partai (Rosidi, 2011 : 331).

Ternyata kepergian tokoh-tokoh teras Partai Masyumi ke Padang bukanlah sekedar untuk pelesir melainkan untuk turut bergabung dalam pergolakan daerah menekan pusat. Di pilihnya Sumatera sebagai tempat untuk melakukan “aksi keras” menekan Presiden Soekarno didasari oleh beberapa pertimbangan, selain alasan Sumatera menyimpan kekayaan alam yang cukup melimpah sebagai sumber devisa negara juga perkara dukungan hangat rakyat terhadap Dewan-Dewan Militer di Sumatera yang menurut MC Ricklefs (2005 : 383) bahwa pemerintahan dewan militer di Sumatera berhasil memberikan citra positif terhadap rakyat dengan melakukan kebijakan pembaharuan-pembaharuan, memperbaiki sekolah-sekolah dan jalan-jalan serta membasmi korupsi. Selain itu faktor ikatan *emosional personal* tokoh-tokoh Partai Masyumi seperti Sjafruddin Prawiranegara, Natsir dan Boerhanoeddin Harahap yang berdarah Sumatera adalah salah satu aspek yang tidak boleh dikesampingkan mengapa mereka memilih Sumatera sebagai basis aksi.

Pada tanggal 10 Februari 1958 tokoh-tokoh teras Partai Masyumi ini turut merumuskan *Piagam Perjuangan Menyelamatkan Negara* bersama dengan perwira-perwira Dewan Militer lainnya dengan dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmah Husein sebagai Ketua Dewan Perjuangan untuk Seluruh Indonesia. Piagam itu berisi tuntutan agar Kabinet Djuanda menyerahkan kembali mandatnya dalam waktu 5 x 24 jam kepada

presiden atau presiden menarik kembali mandate dari Perdana Menteri Djuanda. Kalau tuntutan itu sudah dipenuhi presiden harus mengangkat Hatta dan Sultan Hamengku Buwono IX sebagai formatur untuk membentuk sebuah *zaken kabinet*. Selain itu Piagam Perjuangan pun menyimpan ancaman ultimatum terhadap pusat, apabila semua tuntutannya tidak dipenuhi maka mereka menyatakan bebas terhadap kewajiban taat kepada Presiden Soekarno (Rosidi, 2011 : 331-332).

Pada tanggal 13 Februari 1958 Perdana Menteri Djuanda melalui siaran radio mengumumkan sidang kabinet yang menyatakan menolak tuntutan Piagam Perjuangan. Tetapi Letnan Kolonel Ahmad Husein menunggu sampai habis tenggat waktu yang telah ditetapkan, baru mengumumkan tindakan selanjutnya. Pada tanggal 15 setelah batas tenggat waktu ultimatum itu habis, Letnan Kolonel Ahmad Hussein kemudian mengumumkan tentang pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang berkedudukan di Bukittinggi. Adapun program yang diusung yakni menghapuskan Kabinet Djuanda dan konsep Presiden Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin dan menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan Piagam Perjuangan untuk kemudian menyerahkannya kepada Hatta dan Sultan Hamengku Buwono IX kalau mereka sudah siap dan setuju untuk menerimanya. Dalam kabinet PRRI dua tokoh teras Partai Masyumi mendapat posisi yang sentral yakni Sjafruddin Prawiranegara menjabat posisi Perdana Menteri merangkap

Menteri Keuangan dan Boerhanoeddin Harahap menjabat Menteri Pertahanan merangkap Menteri Kehakiman (Rosidi, 2011 : 333-334).

Pada tanggal 16 Februari Presiden Soekarno mendesak perlakuan tindakan keras terhadap PRRI. Djuanda, AH Nasution dan kebanyakan pemimpin PNI dan PKI juga menghendaki PRRI ditumpas melalui operasi militer. Sementara Hatta dan Sultan Hamengku Buwono IX, dua nama yang sebelumnya disebut-sebut dalam Piagam Perjuangan, mendesak agar PRRI diselesaikan dengan perundingan. Kedua tokoh ini meskipun tidak setuju terhadap cara-cara PRRI namun mereka menempatkan diri pada posisi kompromis.

Sementara Partai Masyumi yang memiliki keturut sertaan para tokohnya dalam PRRI menjadi resah, kelompok Sukiman berkeinginan memecat Natsir, Sjafruddin Prawiranegara dan Boerhanoeddin Harahap dari keanggotaan partai namun dicegah oleh para pendukung mereka (Ricklefs, 2005 : 397). Satu-satunya pembelaan Partai Masyumi dari tuduhan partai turut serta dalam PRRI yakni dengan mengeluarkan statemen partai pada tanggal 17 Februari No.1130/Sek.PP/1/M.VII/58 yang melarang anggotanya dan pimpinan Partai Masyumi memberikan bantuan kepada pemberontak, serta menyalahkan seluruh pemberontakan di Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah dengan ditambahkan poin penegasan bahwa Partai Masyumi tidak ada rencana merobohkan negara (Suryanegara, 2010 : 378)

Usulan perundingan yang diajukan Hatta, Sultan Hamengku Buwono juga Partai Masyumi serta PSI ditolak oleh pemerintah pusat, sebaliknya di ujung bulan Februari 1958 operasi militer untuk menumpas PRRI dilancarkan, Kolonel Ahmad Yani mendapat mandat memimpin operasi penumpasan. Serangan militer udara dan darat diarahkan pada instalasi-instalasi PRRI di Padang dan Bukittinggi. Hanya memakan waktu dua bulan, tepatnya 5 Mei Bukittinggi berhasil direbut dan gerakan PRRI di Sumatera berubah menjadi perang gerilya di wilayah pedalaman, bisa dikatakan pada pertengahan tahun 1958 PRRI sudah dapat dipatahkan, walaupun kehancurannya yang terakhir masih terjadi tiga tahun kemudian (Ricklefs, 2005 : 397)

BAB III
LAHIRNYA DEMOKRASI TERPIMPIN
DAN FASE PENGIKISAN PENGARUH PARTAI MASYUMI

A. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 : Babak Awal Demokrasi Terpimpin

Memasuki tahun 1959 konstalasi politik di Indonesia masih tetap bergejolak. Pasca meletusnya pemberontakan-pemberontakan di daerah sepanjang tahun 1957-58, PRRI/Permesta yang meski secara basis intinya berhasil dihancurkan namun kemudian berubah menjadi gerakan-gerakan gerilya di pedalaman yang jelas mengganggu stabilitas politik dan keamanan di daerah. Ditambah berlarut-larutnya penumpasan DI/TII yang tak kunjung berhasil mencekal aktor pimpinannya, menjadi pekerjaan besar untuk segera dituntaskan.

Sementara di politik tingkat pusat, anjuran Presiden Soekarno pada 25 April 1959 terhadap pimpinan dan anggota Majelis Konstituante mengenai ajakan untuk kembali ke ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945, menuai perdebatan yang tajam dalam majelis. Perwakilan orang-orang Partai Masyumi berada di garis depan yang menyuarakan penolakan tersebut. Mereka tetap kukuh memperjuangkan Islam sebagai ideologi dan undang-undang dasar. Sampai akhirnya di bulan Mei dan Juni tahun 1959 Majelis Konstituante menggelar pemungutan suara untuk memutuskan anjuran tersebut, Majelis Konstituante tetap gagal mengambil keputusan menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan UUD 1945 sebagai

undang-undang dasar negara, karena tidak mencapai dua pertiga dari jumlah suara yang masuk (Suryanegara, 2010 : 389).

Tabel. 3.1

Hasil Pemungutan Suara Majelis Konstituante Tahun 1959
Mengenai Anjuran Kembali ke Ideologi Pancasila dan UUD 1945

Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju
Pertama, 30 Mei 1959	269	199
Kedua, 1 Juni 1959	263	203
Ketiga, 2 Juni 1959	264	204

(Soyomukti, 2010 : 160)

Dampak dari kegagalan pemungutan suara tersebut menimbulkan sikap geram dari kalangan militer. KSAD AH Nasution menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk memecahkan jalan buntu pada tingkat nasional adalah dengan kembali ke UUD 1945 dengan apapun caranya. Tentu saja perubahan yang fundamental itu mengisyaratkan presiden untuk segera mengeluarkan dekrit. Sementara PKI dan PNI sepakat bahwa kembali ke Pancasila dan UUD 1945 adalah satu-satunya cara untuk menerobos kekerasan pendirian partai-partai Islam yang bersikukuh dengan pendirian mengajukan Islam sebagai dasar negara dan undang-undang dasar, yang berdampak menjadi momok kemacetan politik di Majelis Konstituante. Di samping itu kedua partai ini mengkhawatirkan apabila keadaan tetap dibiarkan, dalam arti presiden tidak melakukan *action* penyelamatan, tentara dapat sewaktu-waktu melakukan kudeta

(Ricklefs, 1989 : 402). Pada tahapan ini Soekarno merasa yakin bahwa inilah saatnya dia untuk merebut kendali pemerintahan seratus persen.

Hal yang monumental itu tiba, pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang menetapkan pembubaran Majelis Konstituante, berlakunya kembali UUD 1945 dan pembentukan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) (Lihat Lampiran 1). Keluarnya dekrit bukan berarti tidak mengundang resiko perlawanan dari barisan oposisi, maka untuk menghindari ekses serangan dari para tokoh politik yang tidak senang dengan dikeluarkannya dekrit ini, Presiden Soekarno menunjukkan kekuatannya bahwa dekrit presiden ini didukung oleh pihak militer dalam hal ini Angkatan Darat, kesan itu tercermin dalam ungkapannya :

Dan begitulah, tujuh tahun setelah Angkatan Darat menghadapkan meriamnya kepadaku, keinginan mereka untuk membubarkan sistem kabinet parlementer dan kembali ke UUD 1945 terpenuhi (Adams, 1982 : 424)

B. Pengikisan Pengaruh Partai Masyumi

Bagi sebagian partai-partai politik keluarnya dekrit ini merupakan mimpi buruk bagi masa depan demokrasi di Indonesia, apalagi mengingat ucapan Presiden Soekarno di tahun 1956 yang ingin menguburkan partai-partai yang terlampau banyak, dengan kekuasaan yang sekarang ini digenggam lebih luas. Ambisi Soekarno tersebut sewaktu-waktu dapat menjadi kenyataan. Banyak partai yang melakukan pembenahan diri dengan menunjukkan pelunakan sikap. Pada saat itu terdapat kurang lebih

empat puluh partai gurem yang tumbuh di Indonesia, sepuluh partai politik besar yaitu PNI, Partai NU, PKI, PSII, Parkindo, Partai Katholik, Perti, Partai Murba, Partai Masyumi dan PSI yang tetap diperkenankan berdiri, tetapi semuanya wajib menyatakan dukungan hangat terhadap segala gagasan presiden dalam arti visi/misi/ide/gagasan yang mereka miliki harus sesuai dengan doktrin presiden (Karim, 1983 : 142).

Sementara bagi Partai Masyumi walaupun -untuk sementara- diperkenankan hidup tetapi melihat dari catatan “dosa-dosa besarnya” pada Soekarno, dapat dikatakan bahwa Partai Masyumi hanya tinggal menunggu waktu untuk disingkirkan. Salah satu “dosanya” yang terakhir adalah ketika Presiden Soekarno mengutarakan keinginannya untuk kembali ke UUD 1945, sejak awal Partai Masyumi adalah kelompok yang paling banyak melakukan upaya menghambatnya. Di dalam Majelis Konstituante Partai Masyumi adalah partai yang paling gencar membujuk Partai NU dan partai-partai Islam lainnya untuk ikut menentang anjuran kembali ke UUD 1945, dan upaya itu selalu saja berhasil.

Pasca Dekrit Presiden 1959, peta politik partai-partai Islam berubah, melihat dukungan masyarakat terhadap Demokrasi Terpimpin sudah begitu kuat, Partai NU dan partai-partai Islam lainnya lebih memilih mengamininya daripada melawannya (Soyomukti, 2010 : 142). Sementara Partai Masyumi masih kukuh pada pendiriannya untuk menjadi oposisi dalam pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Bersandar pada peta politik Islam ini Ahmad Syafi'i Ma'arif melukiskan bahwa pasca Dekrit Presiden

1959 partai-partai Islam menempuh jalan bersibak dua yakni secara garis besar ada dua kelompok partai Islam pada masa itu. Kelompok pertama, Masyumi yang memandang keikutsertaan dalam sistem Demokrasi Terpimpin sebagai penyimpangan dari ajaran Islam. Kelompok kedua, yakni Partai NU, PSII dan Perti yang menyebut dirinya Liga Muslimin, berpandangan bahwa turut serta dalam sistem Demokrasi Terpimpin adalah sikap realistis dan pragmatis (Ma`arif, 1996 : 51- 53). Sikap keras Partai Masyumi ini tidak lain adalah kelanjutan keputusan Mukhtar Yogya pada tanggal 23-27 April 1959 yang menegaskan partai menolak ide berlakunya Demokrasi Terpimpin. Dalam Mukhtar itu juga diadakan pemilihan Ketua Umum baru, dan Prawoto Mangkusasmito berhasil terpilih menggulingi Sukiman Wirdjosandjojo. Keterpilihan Prawoto Mangkusasmito adalah sebuah isyarat bahwa Partai Masyumi ke depannya bakal tetap berpendirian oposisi pada Soekarno karena Prawoto secara ideologi dan sikap segaris dengan Mohammad Natsir. Suksesi pemilihan Ketua Umum Partai Masyumi sendiri adalah perintah dari Mohammad Natsir, Ketua Umum lama, agar partai terselamatkan dari eksekusi sikap dirinya yang terjun ke PRRI/Permesta sebagai cara lain beroposisi dengan gerakan angkat senjata pada Soekarno. Namun untuk saran Natsir agar dirinya dinyatakan “dipecat” oleh partai, tidak mendapat dukungan dari anggota-anggota DPP sebab mereka tidak mau menunjukkan sikap kurang kesetiakawanan terhadap Natsir yang sudah menjadi figur kuat partai (IN, 1980 : 233-234).

Sebagai politikus, Prawoto Mangkusasmito jelas lebih muda daripada Sukiman Wirdjosandjojo dan boleh dikatakan sebagai salah seorang muridnya. Namun secara garis sikap politik, Prawoto bertolak belakang dengan seniornya. termasuk dalam menanggapi PRRI. Sebagai Ketua Umum Prawoto Mangkusasmito menegaskan bahwa Partai Masyumi tidak terlibat langsung dalam mensponsori PRRI, dan patuh pada statement partai No.1130/Sek.PP/1/M.VII/58 yang melarang anggotanya memberikan bantuan fisik maupun moril kepada PRRI (Lihat lampiran 7) Namun kenyataannya banyak diantara anggota Partai Masyumi yang memberikan simpati pada PRRI, dan Prawoto Mangkusasmito membiarkannya.

Tokoh Pengurus Besar Partai Masyumi Kasman Singodimedjo adalah salah satu tokoh yang menyuarakan simpati pada PRRI. Dia ditahan di Magelang oleh militer setempat dikarenakan Kasman Singodimedjo dituduh telah mengucapkan kata-kata yang sifatnya mendukung PRRI dalam satu pidatonya di muka rapat umum Partai Masyumi di Magelang. Kasman Singodimedjo diperkarakan hingga ke Kejaksaan Agung atas tuduhan itu (*Harian Suara Merdeka* edisi 14 Agustus 1959).

Pada tanggal 9 Juli 1959 diumumkan susunan kabinet baru yaitu Kabinet Kerja dimana Soekarno memegang pucuk pimpinannya sebagai Perdana Menteri. Banyak diantaranya golongan fungsional dan perwira angkatan bersenjata diangkat mengisi beberapa posisi menteri di kabinet.

Orang-orang partai keterwakilannya sedikit termasuk tidak ada satu pun anggota Partai Masyumi, PSI dan PKI. Partai Masyumi dan PSI jelas tidak akan mendapat kursi di pemerintahan karena kedua partai ini selalu menampakkan sikap permusuhan pada Soekarno.

Tokoh-tokoh PKI memang tidak ada yang duduk di dalam kabinet, tetapi beberapa orang menteri dianggap sebagai simpatisan komunis (Ricklefs, 2005 : 403). Langkah ini adalah strategi Soekarno mengkamufleskan unsur komunis masuk ke dalam kabinet yakni dengan tidak menarik komunis sebagai sebuah institusi namun cukup simpatisannya saja. Belajar dari pengalaman yang sudah-sudah langkah ini diambil agar kekuatan partai-partai Islam, kecuali Partai Masyumi, mau menerima duduk di kabinet baru.

Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan lahirnya Kabinet Kerja bagi militer dianggap sebagai suatu kemenangan negara dan rakyat Indonesia (*Harian Suara Merdeka* edisi 16 Juli 1959). Walaupun mereka menyadari dominasi PKI pada pemerintahan Demokrasi Terpimpin tinggal menunggu waktu, dan posisi militer tidak kalah kuat, dalam hal ini Angkatan Darat siap mengimbangi kekuatan politik PKI melalui kewenangan dan pengaruh-pengaruhnya yang cukup luas setelah berjasa menjadi *backing* presiden dalam pengeluan dekrit. .

Masih di bulan Juli, lembaga-lembaga Demokrasi Terpimpin lainnya segera diumumkan, Dewan Nasional dibubarkan dan dibentuklah Dewan Pertimbangan Agung, seperti halnya suatu lembaga baru yang

disebut Dewan Perancang Nasional. Partai Masyumi beserta PSI tidak terwakili di dalam lembaga-lembaga tersebut, sementara PNI, Partai NU, PKI dan partai-partai lainnya terwakili di dalam kedua lembaga itu (*Harian Suara Merdeka* edisi 30 Juli 1959).

Dalam hal pengaturan sistem kepartaian, Presiden Soekarno mengeluarkan Penpres No.7/1959. Penpres ini lebih mengarah pada langkah untuk menyingkirkan Partai Masyumi. Hal itu bersinyalir pada pasal 9 yang menyebutkan bahwa Presiden setelah mendengar pendapat Mahkamah Agung dapat melarang atau membubarkan partai yang sedang melakukan pemberontakan karena pemimpin-pemimpinnya turut serta dalam pemberontakan-pemberontakan atau jelas memberikan bantuan sedangkan partai tidak resmi menyalahkan perbuatan-perbuatan anggota-anggotanya (Lihat lampiran 2). Dikeluarkannya Penpres ini merupakan semacam bom waktu bagi Partai Masyumi, karena setelah sebelumnya tidak dilibatkan di dalam Kabinet Kerja, DPA dan Dewan Perancang Nasional, sekarang ini ditambah eksistensi Partai Masyumi di gelanggang politik nasional terancam.

Dari permulaannya, sistem Demokrasi Terpimpin condong pada langkah-langkah pengabaian aturan konstitusi yang ditujukan untuk pembentukan oligarki kekuasaan sekaligus penegasan penyingkiran musuh politik. Miriam Budiardjo (1989 : 71) menggambarkan kondisi politik Demokrasi Terpimpin itu dengan ciri bahwa periode ini ialah dominasi presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh

komunis dan meluasnya peranan militer sebagai unsur sosial politik Dengan digulirkannya Demokrasi Terpimpin, terjadilah suatu perubahan dalam sistem politik Indonesia. Indonesia telah jatuh ke sistem kekuasaan otoriter sebab dalam sistem Demokrasi Terpimpin keputusan-keputusan politik terakhir ada pada tangan Soekarno sebagai pemimpin pengendali demokrasi, dan dalam setiap pengambilan keputusan dilakukan dengan suara bulat, tidak memakai pemungutan suara karena hal itu dianggap oleh Soekarno tidak dikenal dalam kebudayaan Indonesia. (Sjamsuddin (ed), Isbodroini Suyanto, 1988 : 81).

Di sisi lain Soekarno menegaskan bahwa Demokrasi Terpimpin bukanlah adu suara dalam pemungutan suara, bukan "*one man one vote*", bukan mayoritas lawan minoritas, bukan oposisi lawan yang berkuasa, bukan penguasa lawan oposisi, bukan pula medan pertempuran antar oposisi (Soyomukti, 2010 : 115) Dalam kesempatan lain Soekarno menjelaskan bahwa Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, tanpa anarkinya liberalisme, tanpa otokrasinya diktator (Ma`arif, 1996 : 53). Sementara dalam menjawab kerisauan publik bahwa dalam sistem Demokrasi Terpimpin Soekarno bakal tampil sebagai pemimpin diktator, Soekarno menyanggahnya :

Saya tidak ingin menjadi diktator saudara dan saudari. Itu berlawanan dengan semangat saya. Saya adalah seorang demokrat. Saya benar-benar seorang demokrat. Tetapi, demokrasi saya bukanlah demokrasi liberal, yang ingin saya lihat di Indonesia kita ini adalah demokrasi terpimpin, demokrasi yang diarahkan, tetapi tetap demokrasi (Wardaya, 2008 : 133)

Di mata Partai Masyumi sistem Demokrasi Terpimpin akan membawa malapetaka bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu gerak politik Soekarno mesti dilawan apapun akibatnya, sekalipun dengan sisa-sisa tenaga yang tidak seimbang. Harapan Masyumi bahwa rakyat akan berpihak kepada demokrasi, tidak kepada sistem otoriter, ternyata sia-sia. Sebab rakyat terlanjur silau pada nama besar Soekarno dan terkesan mengkultuskannya sebagai satu-satunya orang yang mampu mengatasi keadaan bangsa yang terpuruk (Ma`arif, 1996 : 54)

Sementara keterkaitan Demokrasi Terpimpin dengan kelanjutan cita-cita Revolusi Indonesia, seperti yang Soekarno sering dengungkan bahwa revolusi Indonesia belum selesai, Soekarno mengatakan :

Revolusi memerlukan kepemimpinan. Tanpa kepemimpinan akan terjadi panik dan ketakutan. Oleh karena kami masih dalam taraf revolusi ekonomi, aku tidak mengizinkan kritik-kritik yang merusak tentang kepemimpinanku, begitupun aku tidak mengizinkan kemerdekaan pers. Indonesia masih terlalu muda untuk membiarkan pendapat-pendapat yang akan membikin bingung masyarakat (Adams, 1982 : 424)

Petikan perkataan di atas mensiratkan bahwa pemerintahan Demokrasi Terpimpin tidak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas terhadap segala usaha yang akan menggerogoti kewibawaan kepemimpinannya. Bersandar pada dalih bahwa Indonesia sedang dalam revolusi, hal ini dijadikan senjata bagi Soekarno untuk meredam kehadiran kritik. Hal itu tercermin pada sikap pemerintah yang mengharuskan semua redaksi surat kabar berjanji setia dan mendukung pada ideologi negara, revolusi dan pemerintahan Demokrasi Terpimpin dalam setiap materi pemberitaannya.

Namun beberapa terbitan berkala yang berafiliasi pada Masyumi seperti majalah Hikmah dan harian Abadi yang menunjukkan sikap tidak mau tunduk pada aturan otoriter dan tetap vokal mengkritik pemerintah. Akhirnya menuai konsekuensi surat kabar dan majalah mereka dicabut hak izin terbitnya untuk selamanya (Soyomukti, 2010 : 166).

Era Demokrasi Terpimpin pada hakikatnya adalah era yang menandai bangkitnya kembali semangat revolusioner. Demokrasi Terpimpin bertujuan menguatkan kepemimpinan nasional agar unsur-unsur dinamis dari revolusi dapat tertata secara ketat dan tidak mudah dipecah belah oleh imrealisme kapitalisme. Cita-citanya adalah Sosialisme Indonesia, sedangkan metodenya adalah revolusi. Itulah yang disebut Soekarno sebagai "*dunia baru*" (Soyomukti, 2010 : 149). Di bawah ini adalah ucapan Soekarno yang menguraikan cita-cita Sosialisme Indonesia :

Sosialisme kita tidak mengandung konsep-konsep materialisme ekstrem karena Indonesia utamanya adalah bangsa yang takut akan Tuhan dan mencintainya. Sosialisme kita adalah sebuah campuran. Kita menarik kesetaraan politik dari Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Kita menarik kesetaraan spiritual dari Islam dan Kristen. Kita menarik kesetaraan ilmiah dari Marx. Pada campuran-campuran inilah kita lalu menambahkan satu identitas nasional : Marhaenisme. Kemudian kita memadatkannya dalam gotong royong, yang merupakan semangat essensi dari bekerja bersama-sama. Campurkanlah semua itu maka hasilnya adalah Sosialisme Inonesia (Mortimer, 2001 : 92)

Jargon-jargon yang berkaitan dengan semangat, arah haluan dan masa depan Revolusi Indonesia disemaikan luas di masyarakat. Jargon Manipol USDEK yang merupakan akronim dari Manifestasi Politik,

Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia diperkenalkan Soekarno melalui pidato kenegaraan 17 Agustus 1959 yang dikenal dengan judul pidato “*Penemuan Kembali Revolusi Kita*” (*Harian Suara Merdeka* edisi 18 Agustus dan 19 Agustus 1959).

Manipol USDEK menyedot perhatian masyarakat banyak. Para pendukungnya meluas bukan hanya rakyat jelata yang diorganisasi oleh partai politik seperti PNI dan PKI, melainkan banyak juga diterima oleh para pegawai pemerintahan. Artinya doktrin ini diterima sebagai pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan (Soyomukti, 2010 : 117) Ketua DPAS Roeslan Abdulgani, orang dibalik penyusunan logika Revolusi Indonesia, kemudian merumuskan Manipol USDEK menjadi Garis Besar Haluan Negara yang berfungsi memberikan tugas-tugas patriotisme rakyat yang diarahkan pada pembangunan nasional dan *outputnya* diarahkan menjadi lawan dari kekuatan imrealis kapitalisme.

Berbicara tentang perlawanan terhadap imrealisme kapitalisme, PKI secara cerdas memainkan isu populis ini untuk mengarahkannya pada musuh-musuh politiknya di dalam negeri. Partai Masyumi, rival politik terkuat PKI, yang tengah tersandung masalah PRRI santer dijadikan objek *representative* wujud dari agen imrealis kapitalis. Pengaruh agitasi politik PKI ini cukup kuat, salah satunya mempengaruhi banyak sikap politik Soekarno terhadap Partai Masyumi yang di awal-awal Demokrasi Terpimpin lebih refresif.

C. Pengaruh PKI Terhadap Soekarno : Faktor Lain Di Balik Penyudutan Partai Masyumi

Seperti apa yang dikemukakan oleh ahli politik Miriam Budiardjo bahwa masa Demokrasi Terpimpin itu ditandai dengan meluasnya pengaruh PKI di segala lapisan masyarakat dan pemerintahan (Budiardjo, 1989 : 71). Hal itu semua tidak lepas dari peran Soekarno yang memberikan kemudahan-kemudahan pada PKI untuk mengekspresikan segala aktivitas politiknya, di saat partai-partai politik lainnya tengah mengalami masa “pengkebirian”, sehingga kesan bahwa masa Demokrasi Terpimpin PKI di anak emaskan oleh Soekarno sangat tinggi .

Ada analisis lain mengenai kedekatan Soekarno dengan PKI yang menyatakan bahwa Soekarno bukanlah seorang komunis, tetapi yang lebih tepat adalah bahwa ia bergantung pada PKI di dalam usaha mempertahankan posisinya menghadapi militer yang muncul sebagai kekuatan politik yang setara . Ada tiga faktor yang berperan mengapa Soekarno menggandeng PKI, pertama, berdasarkan hasil pemilu 1955 PKI merupakan partai terbesar yang mendapatkan kursi-kursi di daerah-daerah Jawa, kedua, PKI mempunyai kelengkapan keorganisasian yang paling luas dan cermat di kalangan penduduk pedesaan dan kelas bawah perkotaan, ketiga, PKI paling mampu mengerahkan massanya ke rapat-rapat umum tempat Soekarno berbicara (Soyomukti, 2010 : 145-146)

Di samping itu secara *personal* antara Soekarno dan PKI mempunyai keterikatan ideologis yang sama, berangkat dari fakta bahwa

Soekarno juga sangat dipengaruhi oleh Marxisme Bahkan Soekarno di berbagai kesempatan berkali-kali mengatakan bahwa ia seorang Marxis, terhadap ajarannya sendiri (Marhaenis) Soekarno berkali-kali mengatakan:

Bahwa orang tidak akan mengerti Marhaenisme, jikalau ia tidak mempelajari dan mengerti Marxisme (Abdulgani, 1965 : 37).

Dus, orang yang menamakan dirinya Marhaenis, tetapi tidak menjalankan Marxisme di Indonesia, apakah dia Marhaenis atau tidak ? Saya bilang tidak ! Orang yang demikian itu Marhaenis gadungan! (Notosusanto, 1985 : 7).

Pemahaman di atas bahwa Marxisme adalah alat perlawanan dan sekaligus ideologi yang sesuai dengan pribadi Soekarno. Maka ia tak memandang komunis sebagai musuh atau ancaman yang harus disingkirkan sebagaimana tokoh-tokoh lain memandang komunisme dan PKI. Bahkan Soekarno selalu berusaha membela PKI, salah satunya meminta tentara agar menurunkan pembatasan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan PKI (Soyomukti, 2010 : 147)

Kesempatan merajut hubungan mesra dengan presiden ini, dimanfaatkan oleh PKI untuk memukul rival-rival politiknya yang selama ini sering menjegalnya dan membuat partai orangnya komunis ini selalu terisolasi di parlemen dan pemerintahan. Rival politik terbesar PKI tidak lain adalah Partai Masyumi, partai Islam yang paling kukuh menunjukkan sikap tidak kooperatif terhadap PKI dan paling gigih dalam membendung pengaruh komunis di Indonesia. Memanfaatkan peta politik terbalik, PKI yang tengah dalam rangkulan presiden dan di sisi lain hubungan Partai Masyumi dengan Soekarno tengah mencapai titik terburuk, adalah

kesempatan emas bagi PKI untuk mengejewantahkan kebencian dan dendamnya pada partai terbesar kedua ini. Namun sebelumnya perlu diuraikan terlebih dahulu akar permusuhan antara PKI dengan Partai Masyumi.

Secara ideologi antara Partai Masyumi dan PKI memang menunjukkan pertentangan yang sangat fundamental. Partai Masyumi adalah partai agama dengan menempatkan Islam sebagai ideologi dan junjungannya, sementara PKI berpijak pada ideologi Marxisme Leninisme di mana dalam kedua doktrin tersebut menempatkan agama sebagai barang haram bagi manusia (Mortimer, 2011 : 37). Walaupun tidak pernah jelas apakah orang-orang komunis di Indonesia secara sisi kereligiannya benar-benar memproklamirkan dirinya sebagai atheis sebagaimana murninya ajaran Marx, tanpa meninjau dahulu sisi religiusitas orang-orang komunis Indonesia Partai Masyumi tetap menuduh PKI sebagai partai anti agama. Namun pertentangan ini baru sebatas pergulatan permusuhan di ranah ideologi yang tidak kasat mata. Permusuhan yang nyata baru muncul ke permukaan di tahun 1948, yakni ketika sejumlah “kaum kiri” meletuskan gejolak di Madiun.

Menanggapi Peristiwa Madiun, Partai Masyumi mengutuk keras peristiwa tersebut dan menuduh kaum komunis sebagai pemberontak dan pengkhianat terhadap bangsa dan negara. Sejak peristiwa itu Partai Masyumi mengarahkan sikapnya yang sangat *rigid* terhadap PKI dengan menegaskan bahwa bekerjasama dengan kaum anti Tuhan, anti agama dan

anti demokrasi tidak boleh dilakukan untuk selama-lamanya (Samsuri, 2004 : 4).

Sementara di sisi lain melalui statementnya di tahun 1955 atau delapan tahun pasca konflik berdarah di Madiun, DN Aidit menyanggah Persitiwa Madiun sebagai bentuk *subversive* PKI terhadap negara dan balik menuduh bahwa Peristiwa Madiun adalah bagian dari provokasi politik Partai Masyumi yang bertujuan ingin menghabisi kaum komunis, yaitu lewat pancingan mengarahkan PKI pada konflik berdarah dan setelah itu di reaksi dengan pengejaran dan pembunuhan anggota dan simpatisannya. DN Aidit menjelaskan juga bahwa kesempatan Partai Masyumi untuk melakukan hal tersebut sangat terbuka lebar, karena pada waktu itu Partai Masyumi sedang menguasai kabinet dengan Hatta sebagai Perdana Menteri, dan dua tokoh Partai Masyumi yakni Mohammad Natsir dan Sukiman Wirdjosandjojo menjadi kaki tangannya yang paling berpengaruh (Aidit, 2005 : 152).

PKI pun percaya bahwa Peristiwa Madiun adalah pesanan Amerika Serikat pada Kabinet Hatta untuk membasmi orang-orang komunis di Indonesia, dengan imbalan Amerika sebagai negara yang duduk di Komite Jasa Baik akan mendesak Belanda secepatnya mengakui kedaulatan Indonesia. Mitos adanya pertemuan Sarangan antara pihak Indonesia yang diwakili Presiden Soekarno, Perdana Menteri Hatta, Menteri Penerangan Mohammad Natsir, Menteri Dalam Negeri Sukiman Wirdjosandjojo, Mohammad Roem, Kepala Kepolisian Soekanto dengan pihak Amerika

Serikat yang diwakili Duta Besar Merle Cochran dan penasihat Presiden Harry Truman, Gerard Hopkin dalam membicarakan *deal* pembasmian komunis di Indonesia pun tidak luput dari alasan mengapa PKI membenci Partai Masyumi. Dalam pertemuan tersebut orang-orang PKI meyakini bahwa Soekarno hanya bersikap diam sementara Hatta dan tiga orang Partai Masyumi lebih banyak bicara dan menyatakan setuju dengan tawaran Amerika Serikat (Tim Liputan Khusus Musso, 2011 : 59-61).

Walaupun Peristiwa Madiun tidak menyebabkan pemerintah mengganjar PKI sebagai partai terlarang, meski sebenarnya Partai Masyumi mengharapkan sanksi lebih berat yang ditimpakan pada PKI, namun setidaknya pembekuan PKI selama setahun setengah (1949-50) dapat menjadi sanksi sosial politik di depan masyarakat untuk bersikap antipati terhadap PKI dan ajaran komunis. Berharap apabila persepsi itu sudah menyebar ke dalam benak semua lapisan masyarakat, maka PKI walaupun nanti hidup kemabali bakal sepi peminat dan lambat laun akan mati dengan sendirinya.

Sekembalinya ke gelanggang politik nasional di pertengahan tahun 1950, Partai Masyumi tetap menunjukkan sikap antipati dan perlawanan frontal terhadap PKI. Terlebih ketika PKI kembali tersandung masalah sebagai dalang aksi pemogokkan buruh di sarana-sarana vital seperti pabrik, perkebunan dan pelabuhan. Kabinet Sukiman Wirdjosandjojo yang pada waktu itu memerintah segera melakukan beragam upaya agar aksi-aksi pemogokan tidak semakin meluas. Pada 15 Agustus 1951 Perdana

Menteri Sukiman menggelar razia massal terhadap orang-orang komunis. Razia pertama menahan 16 anggota parlemen PKI, 6 orang pegawai tinggi kementerian perburuhan dan seorang editor surat kabar yang pro PKI ditangkap. Selama rentang bulan Agustus-November tak kurang dari 2000 orang-orang PKI ditahan (Sd, 1996 : 31-32). Bagi PKI tindakan Perdana Menteri Sukiman Wirdjosandjojo ini adalah cerminan sikap dari partainya (Sukiman Wirdjosandjojo tokoh Partai Masyumi) yang terus menerus berusaha membendung pengaruh komunis, membenci, memusuhi dan ingin melenyapkan PKI.

Permusuhan dengan PKI ditegaskan kembali dalam Mukhtamar ke VII Partai Masyumi di Surabaya yang diselenggarakan tanggal 3-7 Desember 1954. Partai Masyumi mengeluarkan fatwa anti komunis yang isinya menyatakan bahwa komunisme menurut hukum Islam adalah kufur dan bagi orang yang menganut komunisme dengan pengertian, kesadaran dan meyakini kebenaran komunisme maka hukumnya kafir. Seseorang yang mengikuti komunisme atau organisasi komunis tanpa disertai pengetahuan, kesadaran dan keyakinan pada falsafah, ajaran, tujuan dan cara-cara perjuangan komunis, maka hukumnya sesat (Samsuri, 2004 : 25)

DN Aidit juga mengecam para pemimpin Partai Masyumi, terutama Mohammad Natsir, yang dituduhnya sebagai penghambat terjadinya persatuan nasional. Hal itu didasari pada sikap pimpinan Partai Masyumi itu yang selalu meletakkan strategi pembentukan kabinet pada pokok pikiran menggabungkan tenaga-tenaga non komunis dalam kabinet,

parlemen dan masyarakat serta mengisolir PKI serta crypto komunis dari kabinet (Aidit, 2005 : 206-207). Kecaman DN Aidit itu sebagai bentuk kegeraman PKI yang sepanjang demokrasi liberal digulirkan tidak pernah diikutsertakan duduk di kabinet, sebabnya adalah kuatnya posisi dan pengaruh Partai Masyumi dalam pembentukan setiap koalisi kabinet yang selalu melakukan *bergaining* kabinet bersih komunis. Bahkan ketika di tahun 1957 ketika Presiden Soekarno secara terang-terangan meminta agar dibentuk kabinet empat kaki di mana PKI dilibatkan duduk di dalamnya, mendapat penolakan keras dari Partai Masyumi.

Ketika peta politik beralih pada Demokrasi Terpimpin PKI lebih leluasa lagi menampakkan sikap permusuhannya pada Partai Masyumi. Memanfaatkan kedekatannya dengan Soekarno, PKI mempengaruhi banyak sikap Soekarno dalam menghadapi Partai Masyumi. Melalui pendekatan logika revolusi, manipulasi isu keadaan dan juga istilah atau jargonnya. PKI berhasil membentuk citra negatif Partai Masyumi, atau lebih tepatnya “mengkompori” persitegangan Soekarno dengan Partai Masyumi .

Jargon politik PKI tentang golongan “kepala batu” mempengaruhi logika revolusi Soekarno yang juga memakai istilah yang sama untuk menilai Partai Masyumi sebagai golongan “kepala batu” yang merintangai penyelesaian revolusi (Ma`arif, 1996 : 54). Istilah borjuis nasional dan borjuis pengkhianat dipopulerkan PKI kaitannya dalam kampanye perjuangan kelas sosial. PNI yang berbasis di antara kaum birokrat Jawa

dan bangsawan rendahan, dipersamakan dengan borjuis nasional kelompok yang ditoleran untuk diajak kerjasama. Kesan ini sengaja dibuat PKI karena PNI adalah kelompok elite yang menunjukkan tanda paling banyak untuk siap memasuki aliansi dengan PKI demi melawan partai pesaingnya. Sementara itu Partai Masyumi yang memang sangat kuat dengan bias kewirausahaan dikesankan sebagai borjuis pengkhianat yang dianggap musuh kelas kaum proletar buruh dan tani (Mortimer, 2001 : 66).

Menurut teori PKI sikap permusuhannya pada Partai Masyumi adalah dalam rangka perlawanannya terhadap imperialisme dan feodalisme, dengan berdasar pada stigma bahwa Partai Masyumi sebagai pengikut setia kedua kekuatan tersebut. Karena musuh revolusi Indonesia adalah imperialisme dan feodalisme, maka sikap keras mereka terhadap Partai Masyumi dianggap telah berada dalam *track* yang benar menurut logika revolusi (Ma`arif, 1996 : 158-159).

Sikap Partai Masyumi yang tidak terlalu gandrung dengan gebyar ide revolusinya Soekarno dan seakan tidak mempersoalkan Revolusi Indonesia sudah selesaikah atau tidak, menjadi alasan PKI untuk mencap Partai Masyumi sebagai kontra revolusi. Terlebih saat PRRI/Permesta mencuat ke permukaan dan tersinyalir adanya campur tangan Amerika Serikat yang menyokong gerakan tersebut (Ricklefs, 2005 : 398), PKI menghembuskan hasutan dengan menuduh Partai Masyumi sebagai agen imperialis yang bertugas untuk mengacak-acak persatuan nasional dan

kedaulatan negara bangsa. Pada dasarnya penghinaan yang paling besar menimpa Partai Masyumi, selain penghinaan dari pucuk pimpinan PKI yang menyebut Partai Masyumi sebagai agen imprealis, pengkhianat bangsa dan penipu rakyat (Mortimer, 2001 : 143).

Intrik PKI dalam menyudutkan Partai Masyumi sebagaimana isu lainnya seperti antek CIA, komunisto phobi, anti Bung Karno, anti Manipol, kontra revolusi dan sebagainya. Semuanya itu merupakan bentuk agitasi PKI dalam menghasut kelompok satu dengan kelompok lainnya, dalam hal ini Partai Masyumi yang tengah dijadikan “bulan-bulanan” penyudutan, untuk mencari muka di depan Soekarno. Secara cerdas PKI memanfaatkan konsepsi Soekarno mengenai Nasakom, Manipol, Marhaenisme tanpa Soekarno sendiri menyadarinya (Sjamsuddin (ed) Valina Singka Subekti, 1988 : 164).

Ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden No.7/1959 tentang pengaturan sistem kepartaian. Pasal yang mendapatkan sorotan adalah pasal 9 yang menyebutkan bahwa Presiden dapat membubarkan partai yang sedang memberontak. PKI menyambut baik butir pasal ini, sebab eksistensi Partai Masyumi sebagai rival politiknya berada di ujung tanduk. Terteranya tulisan “sedang memberontak” merupakan sikap *implisit* Soekarno untuk menyelamatkan PKI sebagai partai yang pernah memberontak untuk tidak turut dibubarkan karena Penpres ini.

Terkait wacana pembubaran partai yang sedang memberontak, lebih jauh lagi DN Aidit mengutarakan pendapat bahwa yang lebih penting adalah menghancurkan sumber kekuatan partai-partai ini, menghancurkan basis sosialnya imperialisme dan feodalisme. Selama sumber-sumber ini tidak lagi terlihat, partai-partai yang sedang memberontak (baca : Partai Masyumi dan PSI) akan bisa terus eksis, mungkin dengan nama berbeda, atau mungkin para komprador, tuan tanah dan agen-agen mereka selama ini akan bergabung dengan partai-partai lain yang legal, sehingga pada esensinya partai-partai yang ditumpangi itulah nantinya yang akan menjadi partai baru (Mortimer, 2001 : 143)

BAB IV

PEMBUBARAN PARTAI MASYUMI

B. Penpres: Alat Soekarno Untuk Melenyapkan Partai Masyumi

Tindakan Soekarno yang tidak melibatkan sama sekali wakil-wakil Partai Masyumi dalam badan-badan negara hasil bentukan rezim Demokrasi Terpimpin, tidak kemudian menyurutkan sikap Partai Masyumi untuk tetap vokal mengkritik atau berposisi terhadap kepemimpinan Soekarno. Politik ideologi Nasakom yang sejak permulaan Demokrasi Terpimpin gencar dikampanyekan Soekarno, tidak luput dari serangan kritik dan penolakan dari Partai Masyumi. Partai Masyumi bersikukuh tidak mau menerima Nasakom, alasannya karena Nasakom tidak lain adalah cara-cara Soekarno untuk memaksakan masuknya komunisasi ke segala lapisan negara dan kehidupan bangsa.

Sikap keras Partai Masyumi terhadap rezim Demokrasi Terpimpin membuat Soekarno pada akhirnya berada pada suatu kesimpulan, bahwa langkah-langkah untuk menyingkirkan Partai Masyumi dari peta perpolitikan Indonesia harus segera disusun. Soekarno merasa perlu menggunakan cara-cara yang “legal konstitusi” dan sedikit campuran pembenaran dari “logika revolusi” untuk menyingkirkan partai tersebut, sebab biar bagaimanapun Partai Masyumi adalah partai Islam terbesar yang memiliki potensi kesensitifan apabila membubarkan partai tersebut dengan cara-cara yang tanpa memiliki payung konstitusi di atasnya.

Tepat di pengujung tahun yakni pada tanggal 31 Desember 1959, Presiden Soekarno menerbitkan Penpres No.7/1959 yang berisi aturan-aturan terkait syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian (lihat lampiran 2). Penetapan Presiden ini nampak sekilas hanya dialokasikan keperluannya untuk menganulir atau mencabut Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 mengenai anjuran pemerintah tentang pembentukan partai politik, tetapi hal tersebut merupakan politik standar ganda Soekarno untuk meloloskan maksud terselubung dari Penpres tersebut. Hal itu terdapat pada Bab IV Penpres yang berisi regulasi pembubaran suatu partai, pada Bab IV Pasal 9 berbunyi bahwa Presiden sesudah mendengar Mahkamah Agung dapat melarang dan atau membubarkan partai yang:

1. Bertentangan dengan azas dan tujuan negara
2. Programnya bermaksud merombak azas dan tujuan negara
3. Sedang melakukan pemberontakan karena pemimpin-pemimpinnya turut serta dalam pemberontakan-pemberontakan atau jelas memberikan bantuan, sedangkan partai itu tidak dengan resmi menyalahkan perbuatan anggota-anggotanya.
4. Tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Penetapan Presiden itu.

Soekarno ternyata berhasil meloloskan regulasi terkait permasalahan tata cara dan alasan untuk membubarkan suatu partai yang telah berdiri. Bab pengaturan pembubaran ini jelas dirancang Soekarno untuk dihadapkan

pada partai-partai yang menjadi lawan politiknya yaitu sebagai alat untuk membubarkan Partai Masyumi.

Di sisi lain Soekarno juga membentuk suatu logika revolusi yang dipergunakannya untuk mengenyahkan eksistensi Partai Masyumi, yaitu dengan membenturkan sikap penolakan Partai Masyumi pada ide Nasakom terhadap hilangnya kesetiaan kepada azas dan tujuan negara, yakni Pancasila dan UUD 1945. Soekarno menyatakan :

Siapa yang setuju kepada Pancasila, harus setuju kepada Nasakom; siapa yang tidak setuju kepada Nasakom, sebenarnya tidak setuju kepada Pancasila! Sekarang saya tambah: Siapa setuju kepada UUD 1945 harus setuju kepada Nasakom, siapa tidak setuju kepada Nasakom, sebenarnya tidak setuju kepada UUD 1945 (Ma`arif, 1996 :104)

Partai Masyumi yang menyatakan sikap menolak terhadap ide Nasakom, dengan menggunakan logika Revolusi di atas secara tidak langsung diseret pada kriteria seperti yang ditetapkan pada Bab IX Pasal 9 dari Penpres No.7/1959 yaitu sikap yang bertentangan dengan azas dan tujuan negara.

Mengawali tahun 1960 konflik parlemen dengan Soekarno muncul ke permukaan, ketika itu parlemen menentang keras Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan oleh pemerintah. Jusuf Wibisono, tokoh DPP Partai Masyumi, menjelaskan bahwa pemicu adalah bahwa pemerintah pada waktu itu berpendirian kalau pengeluaran-pengeluaran yang telah disusun dalam RAPBN yaitu penerimaan yang direncanakan sama besarnya dengan pengeluaran yakni sebesar 44 milyar rupiah, dan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan penerimaan akan diambil melalui langkah menaikkan pajak. Sebaliknya fraksi-fraksi dalam

parlemen mayoritas berpendapat bahwa pengeluaran-pengeluaran negara harus disesuaikan dengan membatasinya sekitar 36 sampai 38 milyar rupiah dengan tidak mengadakan pajak-pajak yang terlalu memberatkan (IN, 1980 : 237)

Partai Masyumi dan PSI berperan sebagai provokator pemboikotan RAPBN itu. Kedua sikap partai ini lebih menonjolkan sikap subjektivitas permusuhan terhadap Soekarno yaitu dengan menempuh segala langkah melawan apapun yang pemerintah kehendaki. Parlemen merupakan satu-satunya wadah yang tersisa untuk kedua partai ini menjegal kepemimpinan Demokrasi Terpimpin, sebab di luar itu mereka tidak diberikan peran apapun. Komposisi Nasakom lebih ditekankan pada wajah pembangunan pemerintahan Demokrasi Terpimpin, dan jelas nasib kedua partai ini yang anti Nasakom tidak mendapat peran.

Soekarno tidak kehilangan akal untuk meluluskan segala maksudnya. Dia sadar bahwa aktor utama dari pembangkangan parlemen ini adalah Partai Masyumi dan PSI. Dengan pertimbangan bahwa selama komposisi parlemen tidak disterilkan dari unsur-unsur oposisi atau dalam istilah lain tidak di Nasakomisasi, maka selama itu pula kebijakan-kebijakan pemerintah akan diganjil. Maka atas pertimbangan itu pula lah sikap yang ditempuh Soekarno dalam meluluskan kehendaknya untuk mensahkan RAPBN dengan menempuh cara yang kasar yakni membubarkan parlemen dari hasil Pemilu 1955 tersebut (Soyomukti, 2010 : 159).

Pada 5 Maret 1960 Presiden Soekarno mengeluarkan Penpres No.3/1960 tentang pembubaran DPR hasil pemilihan umum 1955. Alasan presiden membubarkan lembaga pemerintahan tersebut atas dasar bahwa DPR hasil pemilihan umum 1955 tidak memenuhi harapan untuk saling membantu pemerintah, tidak sesuai dengan jiwa dan semangat UUD 1945, Demokrasi Terpimpin dan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Hal itu karena susunan DPR yang sekarang ini hasil dari UUDS 1950 (Lihat lampiran 3).

Memanfaatkan *superpower* yang dimilikinya, Soekarno merasa tidak ada yang tidak bisa melawan pemerintahannya, termasuk mengambil langkah berani membubarkan parlemen yang pada kenyataannya hanya untuk menyingkirkan Partai Masyumi dari parlemen (Ricklefs, 1989 : 405). Sebuah harga mahal yang dibayar oleh Soekarno demi menyingkirkan musuh politik dengan cara membubarkan lembaga Negara yang dibentuk oleh mekanisme demokratis. Jelas sekali tindakan Soekarno tersebut *blunder* dari kewenangannya sebagai presiden, dan itu termasuk ke dalam tindakan yang inkonstitusional, tetapi dalam situasi yang revolusioner sia-sia orang berbicara tentang konstitusional, sebab pada waktu itu Soekarno telah berada di atas konstitusi (Ma`arif, 1995 : 58)

Pada tanggal 24 Juni 1960 Presiden Soekarno menerbitkan Penpres No.4/1960 yang menetapkan susunan DPR GR. DPR GR yang terdiri atas wakil-wakil dari golongan-golongan politik dan golongan-golongan karya (fungsional) dan seorang wakil Irian Barat, yang menyetujui UUD

1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian sendiri serta bersedia turut serta melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959. Jelas sekali bahwa kriteria-kriteria tersebut disesuaikan dengan ketentuan keinginan Soekarno, begitupula ketika Soekarno menentukan orang-orang yang sesuai dengan kriteria tersebut dan cocok untuk didudukkan di parlemen. Semuanya itu tentu saja dapat dengan leluasa diwujudkan, sebagai presiden yang memiliki kekuasaan totaliter ia melakukan penetapan susunan anggota DPR GR sendiri. Hal itu eksplisit tercermin dari kebijakan pemerintahannya yang menetapkan anggota-anggota DPR GR diangkat dan diberhentikan oleh presiden, Ketua dan Wakil Ketua DPR GR diangkat dan diberhentikan Presiden, Peraturan Tata tertib DPR GR ditetapkan dengan Peraturan Presiden, kedudukan dan kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPR GR diatur dengan Peraturan Presiden (Lihat lampiran 5).

Tabel 4.1

Perbandingan partai-partai dan perwakilan di parlemen :

Maret 1951, Agustus 1956, Juli 1960.

Partai, Perserikatan, Golongan	Maret 1951	Agustus 1956	Juli 1960
Fungsional			
Partai Masyumi	49	57	-
PNI	36	57	44
PSI	17	5	-

PIR	17	2	-
PKI	13	32	30
Fraksi Demokrat	13	-	-
PRN	10	2	-
Partai Katholik	9	7	5
Parindra	8	-	-
Partai Buruh	7	2	-
PSII	5	8	5
Parkindo	5	8	6
Partai Murba	4	2	1
Partai NU	-	45	36
Perti	-	4	2
IPKI	-	4	-
Angkatan Darat (golongan fungsional)	-	-	15
Angkatan Laut (golongan fungsional)	-	-	7
Angkatan Udara (golongan fungsional)	-	-	7
Polisi	-	-	5
Buruh	-	-	26
Tani	-	-	25
Kerohanian	-	-	24

Pemuda	-	-	8
Wanita	-	-	9
Cendekiawan dan Pendidik	-	-	5
Tidak punya golongan	-	-	26
Lain-lain	13	25	23
JUMLAH	232	260	283

(Soyomukti, 2010 : 160)

Kenyataannya Soekarno mengangkat orang-orang yang menurutnya dapat dikendalikan, dijinakkan dan patuh pada setiap titah sang presiden. Kondisi DPR GR tidak ubahnya sebagai lembaga “*yes men*” bukan lagi sebagai lembaga pemerintahan yang demokratis dan peranan parlemen sebagai fungsi kontrol pemerintahan ditiadakan yang lebih ditonjolkan peranannya sebagai pelulus keinginan Soekarno.

Adanya jeda waktu dua bulan dari dibubarkannya DPR hasil pemilu 1955 ke DPR GR, adalah digunakan untuk menentukan komposisi yang tepat dalam parlemen yang baru itu. Soekarno membutuhkan kesepakatan dengan unsur-unsur politik Nasakom tentang pernyataan kesetiannya pada Demokrasi Terpimpin. Hasilnya komposisi parlemen DPR GR di atas merupakan hasil Pertemuan Tampaksiring. Pada pertemuan itu hadir Soekarno, Ali Sastroamidjojo, Idham Chalid dan DN Aidit. Ketiga tokoh partai itu dinilai Soekarno telah mewakili politik aliran yang ia inginkan Ali Sastroamidjojo dari PNI mewakili golongan nasionalis, Idham Chalid dari Partai NU mewakili golongan agama dan

DN Aidit dari PKI mewakili PKI. Di sana mereka setuju me-Nasakomsasi parlemen. Waktu itu Partai Masyumi dan PSI belum dibubarkan. Tapi kedua partai tersebut akhirnya disepakati untuk tidak dimasukkan ke dalam DPR GR. Ini persetujuan antara Ali Sastroamidjojo, Idham Chalid, DN Aidit dan Soekarno.

Sementara kaitannya dengan sikap Soekarno terhadap Partai Masyumi dan pembentukan DPR GR, ada upaya Soekarno untuk memecah belah pemimpin-pemimpin Partai Masyumi. Sukiman Wirdjosandjojo dan Jusuf Wibisono, sewaktu keanggotaan DPR GR diumumkan pada 1 April 1960, mereka adalah tokoh Partai Masyumi yang ikut dicantumkan. Sukiman Wirdosandjojo dan Jusuf Wibisono adalah tokoh-tokoh yang anti PKI seperti tokoh-tokoh Partai Masyumi lainnya, tetapi keduanya tidak menunjukkan anti Soekarno sebagaimana kelompok Natsir-Sjafruddin-Prawoto.

Sukiman Wirdosandjojo menjabat Wakil Ketua I Partai Masyumi, diangkat Soekarno sebagai anggota DPR GR tanpa diajak berunding terlebih dahulu dan dikatakan mewakili kaum cendekiawan. Namun sekali pun secara *personal* agak dekat dengan Soekarno, Sukiman Wirdjosandjojo ternyata menolak pengangkatannya. Alasan Sukiman menolak pengangkatan dirinya sebagai anggota DPR GR adalah demi mempertahankan integritas pribadi sebagai pemimpin umat. Ungkapannya tentang “ketidakperwiraan dan kerendahan budi” yang bakal melekat pada dirinya seandainya menerima pengangkatan, sementara partainya

dikucilkan. Sukiman Wirdjosandjojo ternyata tetap memegang teguh etika politiknya Bertolak belakang dengan Jusuf Wibisono yang menerima pengangkatannya sebagai anggota DPR GR mewakili kaum buruh. Bagi Jusuf Wibisono komposisi DPR GR tidak berbahaya pada Islam. Tampaknya beban psikologis Jusuf Wibisono jauh lebih ringan ketimbang Sukiman Wirdosandjojo, karena ia belum pernah menjabat sebagai Ketua Umum sebagaimana Sukiman sebelum digantikan Natsir (Ma`arif, 1995 : 64- 66)

B. Liga Demokrasi : Perlawanan Terakhir Partai Masyumi

Langkah Presiden Soekarno membubarkan parlemen hasil Pemilu 1955 merupakan tendangan kematian demokrasi di Indonesia. Langkah ini juga menimbulkan kecemasan di kalangan partai-partai, yakni timbulnya kekhawatiran bahwa semakin kuatnya pengaruh PKI sebagai penopang kepemimpinan Soekarno ditakutkan pada akhirnya akan menjatuhkan negara pada kepemimpinan pemerintahan komunis. Partai-partai yang menentang langkah Soekarno membubarkan parlemen ini seperti Partai Masyumi, PSI, IPKI, Partai Katholik, Parkindo dan dua tokoh Partai NU yakni Dachlan dan Imron sepakat mendeklarasikan Liga Demokrasi pada 24 Maret 1960. Kemudian organisasi ini langsung menyatakan sikap beroposisinya terhadap pemerintahan Demokrasi Terpimpin serta menyerukan bahaya komunis di dalam pemerintahan dan politik Soekarno (Soyomukti, 2010 : 158)

Liga Demokrasi tidak lain adalah badan perlawanan terhadap sistem otoriter Soekarno (Ma`arif, 1985 : 61) yang dibentuk dengan mengemban dua tujuan. Pertama, sebagai kekuatan penekan kepemimpinan Soekarno dengan menuntut pemulihan dan penegakkan demokrasi. Kedua, sebagai kekuatan untuk membendung meluasnya pengaruh PKI. Dalam gerak langkah perjuangannya, Liga Demokrasi melayangkan berbagai banyak tuntutan dan protes terhadap pemerintah (<http://ensiklopedia.blogspot.com/2009/01/liga-demokrasi.html>) Salah satunya adalah pada akhir Maret 1960, Liga tersebut mengeluarkan satu pernyataan yang antara lain menyebutkan supaya dibentuk parlemen yang demokratis dan konstitusional. Oleh sebab itu rencana pemerintah untuk membentuk DPR-GR harus ditangguhkan. Adapun sebagai alasannya seperti yang dikemukakan Nugroho Notokusanto dan Marwati Djoened Poesponegoro dalam Sejarah Nasional Indonesia VI (1993, 422-423) antara lain :

1. Perubahan perimbangan perwakilan golongan-golongan dalam DPR-GR, memperkuat pengaruh dan kedudukan suatu golongan tertentu.
2. DPR yang demikian pada hakekatnya adalah DPR yang hanya akan meng-iya-kan saja, sehingga tidak dapat menjadi soko guru negara hukum dan demokrasi yang sehat.
3. Pembaharuan dengan cara pengangkatan sebagaimana yang dipersiapkan itu adalah bertentangan dengan azas-azas demokrasi yang dijamin oleh undang-undang

Kehadiran Liga Demokrasi memperoleh sambutan hangat dari banyak pihak, terbukti dalam waktu yang relatif singkat organisasi ini berhasil meluaskan pengaruhnya dengan membentuk sejumlah cabang di beberapa daerah antara lain di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bogor dan Makassar. Bahkan beberapa pimpinan Pimpinan Partai NU dan PNI di daerah juga ada yang bergabung di dalamnya. Hatta yang selama dua tahun absen dalam dunia politik dan lebih suka berdiam diri muncul memberikan dukungan (Soyomukti, 2010 : 159)

Liga Demokrasi pada hakikatnya adalah Liga Anti Komunis. Pada mulanya militer memberikan dukungan terbatas pada Liga Demokrasi. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa militer berdiri di belakang IPKI, yang merupakan salah satu organisasi pendiri Liga Demokrasi. Bahkan militer seakan memberi jaminan terhadap aktivitasnya, sehingga untuk sementara waktu membiarkan Liga Demokrasi berkembang karena hendak memanfaatkannya untuk membendung perluasan pengaruh PKI di dalam pemerintahan

Demokrasi

Terpimpin

(<http://ensiklopedia.blogspot.com/2009/01/liga-demokrasi.html>).

AH Nasution dan Sukendro adalah dua perwira Angkatan Darat yang secara diam-diam menyokong hadirnya Liga Demokrasi dalam rangka menghadapi PKI. Alasannya Angkatan Darat melihat dari 283 anggota DPR GR yang diangkat Soekarno, 17 hingga 25 persennya terdiri dari anggota atau simpatisan PKI. Misal MH Lukman dari PKI diangkat jadi wakil ketua DPR GR dan DN Aidit menjadi wakil ketua MPRS.

Kecuali di dalam kabinet, PKI telah berada hampir di semua lapisan lembaga pemerintah (Anwar, 1995 : 182).

Sayangnya selain dari faktor kepentingan yang sama antara militer dan Liga Demokrasi yang memandang PKI sebagai bahaya laten, tidak ada kesamaan lain yang dimiliki oleh militer dan Liga Demokrasi. Perjuangan Liga Demokrasi yang juga menuntut diberlakukannya kembali sistem Demokrasi Parlemerter menuai sikap antipati militer. Alasannya bahwa sedari dulu militer adalah pihak yang paling vokal menentang pemberlakuan sistem Demokrasi Parlemerter, karena menganggap bahwa kekuasaan luas yang diberikan pada partai politik hanya akan berbuah ketidakstabilan politik. Karena itu di sisi lain mereka (militer) memandang bahwa langkah Soekarno dalam membubarkan Demokrasi Parlemen adalah sudah tepat, suatu pandangan yang bertolak belakang dengan tuntutan Liga Demokrasi. Maka atas dasar itu pula kemudian militer perlahan menarik dukungan dari Liga Demokrasi.

Ketika Liga Demokrasi kehilangan dukungan dari militer, organisasi itu semakin mendapat hambatan dan penentangan dari musuh-musuh politiknya. Hubungan militer dengan Liga Demokrasi semakin renggang itu terlihat ketika dengan menggunakan pertimbangan bahwa telah timbulnya reaksi dan insiden politik di berbagai tempat yang diakibatkan oleh kegiatan politik Liga Demokrasi. Penguasa militer daerah kemudian menetapkan larangan terhadap kegiatan Liga Demokrasi di daerah-daerah.

Bukan hanya dari pihak militer saja yang menuai jarak, sejumlah partai politik yang awalnya mendukung Liga Demokrasi pun akhirnya menarik perlahan dukungannya. Partai NU adalah salah satunya yang kemudian turut arus dengan membatasi kegiatan Liga Demokrasi dan mengeluarkan pernyataan bahwa anggotanya yang terlibat menjadi anggota atau pendukung Liga Demokrasi bukanlah mengatasnamakan partai, melainkan atas nama perorangan saja dan menyatakan bahwa keikutsertaan anggotanya bukanlah mencerminkan sikap politik umum dari Partai NU. Hal ini diambil sebab mereka melihat kedudukan Soekarno semakih hari semakin kuat dan sangat sulit apabila melawannya dalam hal ini menempatkan diri sebagai oposisi politik atau sekedar mengkritik. Sikap yang dimunculkan sejumlah partai itu tidak lain adalah bentuk oportunisme partai (<http://ensiklopedia.blogspot.com/2009/01/liga-demokrasi.html>).

Pada akhirnya kelangsungan hidup Liga Demokrasi hanya berjalan singkat, tidak kurang satu tahun Presiden Soekarno segera memerintahkan militer dalam hal ini Angkatan Darat AH Nasution untuk membubarkan Liga Demokrasi. Kemudian instruksi itu dilaksanakan tanpa ada bantahan dari AH Nasution maupun perlawanan dari Liga Demokrasi. Sikap AH Nasution tersebut bertolak belakang dengan sikap sebelumnya yang menyokong restu hadirnya Liga Demokrasi.

C. Pembubaran Partai Masyumi : Tumbal dari Logika Revolusi Soekarno

Pada 21 Juli 1960 Presiden Soekarno mengundang tokoh-tokoh dari Partai Masyumi ke Istana Bogor, dan seminggu berikutnya pertemuan dilanjutkan kembali di Istana Merdeka yakni untuk memenuhi undangan presiden yang meminta jawaban tertulis atas berbagai pertanyaan yang diajukan presiden kepada Partai Masyumi sehubungan dengan dikeluarkannya Penpres No 7/1959 yang diundangkan akhir tahun 1959. Selain Partai Masyumi diundang juga tiga tokoh PSI juga mengemban topik permasalahan yang sama. Delegasi dari Partai Masyumi diwakili oleh Ketua Umum Prawoto Mangkusasmito dan Sekretaris Umum Yunan Nasution

Seperti apa yang diungkapkan oleh Yunan Nasution kepada Badruzzaman Busyairi dalam buku biografi *Catatan Perjuangan HM Yunan Nasution* (1985,257-261) bahwa Partai Masyumi harus mengemukakan jawaban tertulisnya mengenai tiga pertanyaan yang diajukan oleh Presiden Soekarno. Di bawah ini adalah cuplikan tanya jawab tersebut :

Pertanyaan Pertama, apakah Partai Masyumi bertentangan dengan azas dan tujuan negara ?

Partai Masyumi menjawab tidak! Alasannya karena Partai Masyumi yang berazaskan Islam mempunyai tujuan yang sangat jelas yaitu terlaksananya ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan orang seorang, masyarakat dan negara Republik Indonesia menuju keridhaan ilahi sesuai pasal 3 Tafsir Azas Partai Masyumi. Sedangkan menurut Pembukaan UUD 45 yang diartikan sebagai azas ialah kata-kata berkedaulatan rakyat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan Perwakilan, serta Keadilan Sosial. Sementara yang dimaksud sebagai tujuan negara adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, pembentukan suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan tidak mengajukan keterangan yang panjang lebar, kami dapat mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa azas Islam dan tujuan partai tersebut di atas tidak bertentangan dengan azas dan tujuan di dalam Pembukaan UUD 45 adalah termasuk dalam pelajaran Islam dan menjadi pelajaran yang fundamental.

Pertanyaan Kedua, apakah program Partai Masyumi bermaksud merombak azas dan tujuan negara ?

Partai Masyumi menjawab tidak! Tidak mungkin program Partai Masyumi, jangka panjang maupun pendek, bermaksud merombak azas dan tujuan negara sebab sesuatu program yang bermaksud merombak azas dan tujuan negara akan bertentangan dengan azas dan tujuan Partai Masyumi. Perjuangan Partai Masyumi yang ditentukan Tafsir Azas partai, dan telah ditetapkan pada Mukatamar VI di Jakarta Tahun 1952 berbunyi :

Kita Perjuangkan ini dengan menyusun tenaga umat dengan tertib, dengan membangunkan prikehidupan lahir bathin, pengertian dan akhlak umat dan mendidik sifat, kekuatan dan kecakapan untuk memperoleh segala syarat mendukung dan mengembangkan cita-cita Islam sebagai tatacara hidup yang memberikan rahmat bahagia bagi segenap makhluk. Kita perjuangkan ini melalui jalan yang sah, sebagaimana terbuka jalannya dalam negara Republik Indonesia kita yang berdasarkan kedaulatan rakyat, melalui saluran yang lazim dalam negara demokrasi. Cita-cita yang luhur dan suci ini hanya dapat ditumbuhkan dalam ketertiban dan keamanan. Kekacauan tidak dapat tidak mengakibatkan pemborosan tenaga dan jiwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kekacauan membawa semua usaha dan ikhtiar ke jalan buntu dan keruntuhan seluruhnya, oleh karena itu kita menolak tiap-tiap usaha dari pihak mana pun juga yang mengakibatkan kekacauan dan kelumpuhan negara serta alat-alatnya.

Pertanyaan Ketiga, apakah Partai Masyumi satu partai yang sedang melakukan pemberontakan karena pemimpin-pemimpinnya turut serta dalam pemberontakan atau telah jelas memberikan bantuan, sedangkan partai itu tidak dengan resmi menyalahkan perbuatan-perbuatan anggotanya ?

Partai Masyumi menjawab tidak! Alasannya sebab Penpres No7/59 itu telah menetapkan sendiri tanggal mulai berlakunya yaitu pada tanggal 31 Desember 1959. Padahal sejak Mukhtar yang ke IX April 1959 di Yogyakarta, telah ditetapkan susunan Pimpinan Pusat yang terdiri Ketua Prawoto Mangkusasmito, Wakil Ketua I Sukiman Wirdjosandjojo, Wakil Ketua II Faqih Usman, Wakil Ketua III Mohammad Roem, Sekretaris Umum Yunan Nasution, Anggota terdiri : Kasman Singodimedjo, Anwar Harjono, Ki Taufikurrahman, AR Baswedan, Ardiwinangun, Hasan Basri, Osman Raliby, Sindian Djajadiningrat, Saleh Iskandar, Ahmad Azhari, Djamaluddin Dt Singomangkuto, Sunaryo Mangunpuspito, Samsuridjai. Pengurus Harian : Prawoto Mangkusasmito, Sukiman Wirdjosandjojo, Faqih Usman, Mohammad Roem, Yunan Nasution, Anwar Harjono, Hasan Basri, Osman Raliby. Kemudian para anggota Dewan Partai yang berjumlah 96 orang tidak ada satu pun di antara mereka yang tuirot serta dalam pemberontakan atau jelas-jelas memberikan bantuannya. Mengenai para pemimpin Partai Masyumi di daerah-daerah oleh Pimpinan Pusat dijelaskan adanya kenyataan bahwa sejak tanggal 5 September 1958 Partai Masyumi sebagai organisasi telah dilarang oleh yang berwajib di daerah-daerah pemberontakan yaitu Tapanuli, Sumatera Barat, Riau daratan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Sejak saat itu pimpinan sesuai dengan larangan itu telah mengambil ketetapan bahwa Partai Masyumi di daerah-daerah tersebut tidak ada lagi dan diputuskan segala hubungan seluruh partai dan sejak saat itu pula dalam surat-surat Partai Masyumi selalu disebutkan kata-kata : *Kepada Dewan Perwakilan Wilayah/Cabang Partai Masyumi di seluruh Indonesia (kecuali daerah Tapanuli, Sumatera Barat, Riau daratan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah)*. Juga dalam Mukhtar Partai Masyumi ke IX di Yogyakarta utusan dari daerah-daerah tersebut tidak lagi diundang dan memang tidak ada. Pula dalam menyusun kepengurusan baru pun di daerah-daerah yang bersangkutan tidak dibuka lagi perwakilan-perwakilan seperti di masa-masa yang sudah. Dalam hubungan ini Pimpinan Pusat Partai Masyumi merasa perlu mengingatkan kembali Statement Partai Masyumi No.1130/Sek-PP/I/M.VIII/1958 tanggal 17 Februari 1958 yang ditandatangani oleh Sukiman Wirdjosandjojo dan Yunan Nasution Dalam statement itu tegas disebutkan antara lain keyakinan Partai Masyumi bahwa pembentukan Pemerintah Revolusioner adalah inkonstitusional dan pembentukan Kabinet Karya dan Dewan Nasional pun inkonstitusional Dalam statement diberikan saran-saran obyektif untuk mengatasi krisis yang sedang melanda tanah air.

Tegasnya dalam menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemerintah, Partai Masyumi terus mengelak dari segala tuntutan-tuntutan yang dituduhkan pemerintah bahwa Partai Masyumi mensponsori PRRI dengan berdasar pada keterlibatan Ketua Umum Partai Masyumi Natsir yang terlibat di dalamnya. Kedua tokoh ini menegaskan bahwa yang memimpin Partai Masyumi sekarang ini bukan lagi Natsir tapi Prawoto Mangkusasmito, dan yang ikut ke PRRI bukan mengatasnamakan partai melainkan orang-orang atas nama pribadi (Anwar, 1995 : 183)

Bersandar pada hasil pemanggilan perwakilan Partai Masyumi ke istana dan melihat dari sikap mereka yang tetap keras mendebat pemerintah. Soekarno menilai Partai Masyumi tidak lebihnya seperti kekuatan kepala batu yang hanya akan merintang jalannya revolusi Indonesia. Walaupun para tokoh Partai Masyumi itu mengemukakan argument-argumen yang rasional namun kebencian Soekarno pada Partai Masyumi sudah jauh melebihi batas-batas rasionalnya. Menurut logika revolusi Soekarno, Masyumi tidak patut lagi hidup dan harus dikorbankan demi revolusi (Ma`arif, 1996 : 54).

Maka tepat pada hari perayaan dirgahayu kemerdekaan yakni 17 Agustus 1960 dengan berpijak pada Penpres No 7/1959 Pasal 9, ditambah dengan menetapkan Keppres No 200/1960 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa untuk kepentingan keselamatan negara dan bangsa, perlu membubarkan Partai Masyumi oleh karena partai itu melakukan pemberontakan (Lihat lampiran 8). Maka diputuskan oleh pemerintah

untuk membubarkan Partai Masyumi termasuk bagian-bagian/cabang-cabang/ranting-rantingnya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dari dua Keputusan Presiden tersebut secara langsung negara menekan Partai Masyumi untuk segera membubarkan diri jika tidak ingin dinyatakan sebagai partai terlarang. Namun di pihak lain Partai Masyumi besikeras tetap ingin melawan dengan sisa-sisa kekuatan yang ada. Mohammad Roem diberikan kuasa oleh Prawoto Mangkusasmito untuk menggugat perintah pembubaran itu. Gugatan diajukan melalui Ketua Pengadilan Istimewa Negeri Jakarta tertanggal 8 September 1960. (Ma`arif, 1995 : 69)

Isi surat gugatan Mohammad Roem yang dilayangkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta (Busyairi, 1985 : 263) yakni meminta untuk memeriksa dan memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Penpres No.7/1959 dan Penpres No.13/1960 tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Membatalkan setidak-tidaknya menyatakan batal karena hukum Kepres No.200/1960.
3. Menghukum tergugat membayar ongkos perkara.

Namun setelah hampir sebulan lebih surat gugatan itu dilayangkan tidak ada jawaban sama sekali dari pihak pengadilan. Baru pada 11 Oktober 1960, Ketua Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Moh. Rochjani Soe`oed menyatakan bahwa pihaknya tidak berwenang untuk memeriksa

perkara tersebut. Jawaban tersebut sudah terlambat atau didahului oleh sikap Partai Masyumi yang jauh sebelumnya telah menyatakan bubar.

Sikap pembubaran diri itu dengan menimbang dari segala konsekuensi yang mesti dihadapi apabila Partai Masyumi tetap kukuh tidak mau membubarkan diri yaitu dapat menimbulkan ekses penangkapan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan Partai Masyumi di seluruh tanah air, dan hal itu tidak menjamin bakal tidak mendapatkan perlawanan fisik. Maka dengan kebesaran hati demi menjaga keselamatan umat dari kemudharatan yang lebih riskan, Partai Masyumi pada tanggal 13 September memutuskan membubarkan diri (Lihat lampiran 9)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sikap politik Soekarno dalam menghadapi kemacetan politik pemerintahan seperti jatuh banggunya kabinet dalam tempo yang relatif singkat serta *deadlocknya* konsensus nasional berkenaan penetapan dasar negara dan undang-undang dasar baru di dalam Majelis Konstituante, dinilai Soekarno sebagai akibat dari penerapan Demokrasi Liberal yang prematur di Indonesia. Langkah Soekarno dalam mengatasi keadaan tersebut ialah dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke UUD 1945 dan membubarkan Majelis Konstituante. Soekarno berani mengambil langkah fundamental tersebut didorong oleh kepentingan politisnya yaitu keinginan untuk mengambil alih kekuasaan secara penuh sebab sebelumnya dia merasa didomestikasi dengan hanya didudukan sebagai lambang persatuan di dalam tatanan Demokrasi Liberal. Di samping itu ambisi revolusioner Soekarno yang ingin menuntaskan jalannya Revolusi Indonesia yang selama Demokrasi Liberal terbengkalai menjadi salah satu alasan Soekarno untuk menggenggam kekuasaan dengan menampilkan dirinya sebagai pemimpin komando yang mengarahkan penciptaan situasi yang revolusioner dan tindakan yang revolusioner .

Dekrit Presiden tersebut kemudian menjadi tonggak bagi berlakunya sistem Demokrasi Terpimpin, suatu sistem yang memunculkan

Soekarno sebagai pemimpin otoriter yang mengendalikan semua tatanan pemerintahan negara. Demokrasi Terpimpin menunjukkan era kebangkitan *euphoria* Revolusi Indonesia, atau tepatnya arah politik yang menitikberatkan pada penjawantahan ambisi ideologis Soekarno. Dengan memainkan isu-isu revolusioner Soekarno kerap melakukan tindakan *blunder* konstitusi. Termasuk adalah membunuh hak demokrasi Partai Masyumi yang dianggapnya sebagai kekuatan kontra revolusi, sebuah istilah yang lebih menghaluskan kenyataan bahwa Partai Masyumi merupakan ganjalan besar politik Soekarno yaitu duri dalam keberadaan kekuasaan Soekarno.

Partai Masyumi adalah satu dari sedikit partai yang berani menunjukkan sikap oposisi terhadap Soekarno. Setelah sebelumnya menolak Konsepsi Presiden di tahun 1957, Partai Masyumi juga mengecam keluarnya Dekrit Presiden dan pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Partai Masyumi adalah partai yang pro Demokrasi Liberal, yang secara ideologis berseberangan dengan Soekarno yang anti Demokrasi Liberal. Ada perbedaan pandangan antara Partai Masyumi dengan Soekarno dalam menilai kemacetan politik, Partai Masyumi melihat situasi tersebut merupakan bagian dari dinamika proses berdemokrasi dan akan sendirinya teratasi dengan seiringnya waktu pendewasaan berpolitik bernegara. Meskipun demikian Partai Masyumi juga tidak luput dari kepentingan politik dengan sikapnya yang bersikukuh mempertahankan Demokrasi Liberal, sebab dalam wahana demokrasi yang

demikian Partai Masyumi sudah merasa berada di atas angin dalam mengendalikan kekuasaan pemerintahan, hal tersebut terbukti dengan berpengaruhnya Partai Masyumi dalam setiap konsensus pembentukan cabinet, maka langkah Soekarno merubah tatanan demokrasi dianggap oleh Partai Masyumi sebagai ancaman terhadap kepentingan kekuasaannya.

Bagi Partai Masyumi sistem Demokrasi Terpimpin bukanlah pemecahan masalah dari kemacetan politik namun hanya akan menimbulkan permasalahan yang baru dengan dirangkulnya PKI di sekitar kekuasaan otoriter Soekarno yang dikhawatirkan sewaktu-waktu bakal melakukan *coup* pada pemerintahan. Namun karena adanya kesinambungan ideologis antara Soekarno-PKI dan adanya kesamaan watak politik dikeduanya yang sama-sama menganut progressif revolusioner, maka Soekarno lebih memilih sikap untuk menyisihkan Partai Masyumi yang dianggapnya sebagai kelompok di luar kubu Demokrasi Terpimpin yang berhaluan progressif revolusioner .

Dalam Demokrasi Terpimpin Soekarno tidak sedikit pun memberikan ruang bagi Partai Masyumi untuk terlibat di dalam pemerintahan. Wakil-wakil Partai Masyumi tidak dimasukkan di dalam Kabinet Kerja, DPA dan Deppernas, kemudian disusul tindakan Soekarno yang membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 di bulan Maret 1960 dan pengumuman pembentukan DPR GR di bulan Juni 1960 yang didalamnya tidak satu pun perwakilan Partai Masyumi diikutsertakan sebagai anggota

DPR. Klimaksnya Partai Islam terbesar itu pada akhirnya harus dibubarkan melalui Penpres No.7/59 dan Keppres No.200/60. Hal ini lebih disebabkan atas kegigihannya memperjuangkan hak-hak demokrasi dengan melawan sistem tirani, dan sebagai konsekuensi dari sikap para pemimpinnya yang selalu menunjukkan vokal oposisi terhadap Soekarno. Meskipun akhirnya dibubarkan, Partai Masyumi telah mewariskan teladan mengenai sikap *amar ma`ruf nahi mungkar* yang selalu konsisten diamalkan dengan menempuh segala resiko yang dihadapinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, Roeslan. 1965. *Sosialisme Indonesia*. Jakarta : Prapantja
- Adams, Cindy. 1982. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Anwar, Rosihan. 1995. *Soebadio Sastroatomo: Pengemban Misi Politik*. Jakarta: Grafiti.
- Budiardjo, Miriam. 1989. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia.
- Busyairi, Badruzzaman. 1985. *Catatan Perjuangan HM Yunan Nasution*. Jakarta : Pustaka Panjimas
- Dake, Antonie CA. 2006. *Sukarno File*. Jakarta : Aksara Karunia
- Gaffar, Affan. 2006. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gottschalk, Louis. 1984. *Mengerti Sejarah*. Jakarta : UI Press
- IN, Soebagijo. 1980. *Jusuf Wibisono; Karang di Tengah Gelombang*. Jakarta : Gunung Agung.
- Jurdi, Syarifuddin. 2008. *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Karim, Rusli. 1983. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Sebuah Potret Pasang Surut*. Jakarta : CV Rajawali.
- Kirbiantoro, S dan Dody Rudianto. 2006. *Pergulatan Ideologi Partai Politik di Indonesia; Nasionalisme-Islamisme, Komunisme-Militerisme*. Jakarta: Inti Media Publisher.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1996. *Islam dan Politik ; Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Mortimer, Rex. 2011. *Indonesian Communism Under Sukarno*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Noer, Deliar. 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta : Grafiti Pers.
- Notosusanto, Nugroho. 1975. *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Yayasan Obor
- _____ dan Marwati Djoened Puspongoro. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta :

- Rahardjo, Imam Toto K dan Herdianto WK. 2001. *Bung Karno Wacana Konstitusi dan Demokrasi*. Jakarta : Grasindo
- Ricklefs, MC. 2005 *.Sejarah Indonesia Modern*.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Rosidi, Ajip. 2011. *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*. Jakarta : Pustaka Jaya
- Tim Liputan Khusus Musso (Tempo, 8-14 November 2010). 2011.*Musso Si Merah di Simpang Republik*. Jakarta : KPG dan Tempo
- Samsuri. 2004. *Politik Islam Anti Komunis Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal*. Yogyakarta : Safiria Insania Press
- Sjamsuddin, Nazaruddin (ed). 1988. *Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*. Jakarta : CV Rajawali.
- Sekretariat Negara RI. 1997. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1955-1965*. Jakarta : Jayakarta Agung Offset.
- Sd, Subhan. 1996. *Langkah Merah Gerakan PKI 1950-1955*. Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya
- Soyomukti, Nurani. 2010. *Soekarno Otoriter*. Yogyakarta : Garasi
- Suryanegara, Ahmad Mansyur. 2010. *API Sejarah 2*. Bandung : Salamadani.
- Wardaya, Baskara T. 2008. *Indonesia Melawan Amerika 1953-1965*. Jakarta : Galangpress
- Widja, I Gde. 1988. *Pengantar Ilmu Sejarah, Sejarah Dalam Perspektif Pendidikan*. Semarang : Setya Wacana
- Widjaja, AW. 1989. *Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan UUD Negara Indonesia Dalam Lintasan Sejarah Dua Dasawarsa (1945-1965)*. Jakarta : CV Fajar Agung
- Arsip :
- Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75. 1959. *tentang Dekrit Presiden Republik Indoensia kembali kepada Undang-undang Dasar 1945*
- Lembaran Negara Republik Indonesia No. 149. 1959. *tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian*.
- Lembaran Negara Republik Indonesia No. 24. 1960. *tentang pembaharuan susunan Dewan Perwakilan Rakyat*

Lembaran Negara Republik Indonesia. No. 78. *tentang susunan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.*

Lembaran Negara Republik Indonesia No.79. 1960 *tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai.*

Surat Kabar :

Harian Suara Merdeka, edisi Sabtu 8 Juni 1957.

Harian Suara Merdeka, edisi Kamis 16 Juli 1959

Harian Suara Merdeka, edisi Jum`at 30 Juli 1959.

Harian Suara Merdeka, edisi Jum`at 14 Agustus 1959.

Harian Suara Merdeka, edisi Selasa 18 Agustus 1959.

Harian Suara Merdeka, edisi Rabu 19 Agustus 1959.

Internet :

<http://historiaensiklopedia.blogspot.com/2009/01/liga-demokrasi.html>

Lampiran 10

ARTIKEL SUARA MERDEKA



Penundjukan Anggota Dewan Nasional Dengan Musjawarah

Antara Presiden Dgn Kabinet — D. N. Tak Akan Sebabkan Perubahan Fundamentlil Ketatanegaraan Kita — Djawaban Pemerintah Kepada Parlemen

SIDANG PARLEMEN pleno terbuka hari Djum'at kemarin mendengarkan jawaban Pemerintah yang ditandatangani oleh P.M. Djuanda atas pandangan umum II mengenai program politik Pemerintah. Pada penutupan pidatonya yang panjangnya 45 halaman, P.M. Djuanda menegaskan lagi, bahwa dengan berpedoman pada "keselamatan negara," Pemerintah akan terus memajukan tugas-

Pembangunan berjalan seret, korupsi makin meluas, akan tetapi sesudahnya pergolakan di daerah, maka kesulitan yang kita hadapi tidak lagi bertambah dalam arti tingkat meningkat, melainkan sudah beralih kebidang lain, yang sudah merupakan bahaya bagi keselamatan Negara.

Kehilangan hubungan erat antara Daerah dan Pusat, keretakan dalam tubuh alat2 kekuasaan Negara, menyebabkan bahwa ekonomi nasional kita sudah melintir kearah disintegrasi, dan jika tak dapat dibendung, maka menurut hemat Pemerintah Bangsa dan Negara akan terjerumus kedalam jurang malapetaka.

Maka dari itu tugas terpenting dari Pemerintah dalam tingkatan sekarang ini ialah segera menjelekkan soal keutuhan alat2 kekuasaan Negara dan soal daerah, dengan demikian memelihara keutuhan ekonomi.

Mengembalikan kesatuan dalam kehidupan perekonomian Negara merupakan satu syarat ter-

Pemerintah akan terus memajukan tugasnya, selama terlihat adanya kesempatan untuk bekerja sesuai dengan kebijaksanaan yang telah diturunkan, ketjuali apabila Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat lain.

Demikian Pemerintah pada penutupan pidatonya setelah menjawab keritik2 dan saran2 anggota2 Parlemen mengenai program politikna.

Sehabis pidato PM Djuanda, sidang ditutup oleh Wakil Ketua Arudji Kartawinata yang menerangkan, bahwa sampai kini tidak ada masuk usul2 resolusi maupun usul2 mosi mengenai program politik Pemerintah.

Sebagaimana telah kita kabarkan, Djum'at malam parlemen mengadakan sidang untuk memberi kesempatan kepada para fraksi guna mengajukan usul mosi.

Mengenai soal ini dalam klangan parlemen Djum'at pagi kemarin telah tersiar kabar, bahwa fraksi Masjumi akan mengeluarkan statement yang maksudna

nya, selama terlihat adanya kesempatan bekerja sesuai dengan kebijaksanaan yang telah diturunkan, ketjuali apabila parlemen berpendapat lain. Diterangkan lagi oleh Pemerintah tentang keadaan negara pada dewasa ini sbh: Kita semua tahu, bahwa sesudahnya pengukuran kemerdekaan pada akhir 1949, Negara dan Bangsa kita belum dibebaskan dari kesulitan, yang makin lama makin bertambah.

menit dalam ketatanegaraan kita, berbeda misalnya dgn pembeuktukan pro-senat atau sistem Kabinet Presidentil dimana Presiden bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Penundjukan anggota2 Dewan Nasional akan dilaksankan dgn jalan musjawarah antara Presiden dan Kabinet. Nasihat2 badan itu, yang tidak mengikat, dibicarakan atas musjawarah, sehingga terjapai persesuaian pendapat antara Pemerintah dan Dewan Nasional. Pemerintah dan Dewan Nasional, Pemerintah dan Dewan Nasional, Pemerintah dan Dewan Nasional, Pemerintah dan Dewan Nasional, Pemerintah dan Dewan Nasional.

Soal2 normalisasi keadaan Republik.

Pemerintah tegas menyatakan, bahwa persoalan tidak puas di daerah2 atjapali dibicarakan oleh orang2 atau golongan2 yang hendak memantjng diri kerah, sehingga ditimbulkan perasaan antipusat didalam hati masyarakat daerah.

Pan Pemerintah meninjau adanya gejala2 yang menundjukan, bahwa perasaan anti pusat itu di gospek oleh orang2 yang hendak menjajal perlindungan didalam parakan2 daerah untuk menentu-

berusaha menjari penyelesaian dengan jalan musjawarah sedjauh mungkin, dan tidak melepaskan kesempatan hierarki dan disiplin, sedjalan dgn garis politik Pemerintah.

Selubungan dgn peristiwa di daerah banyak sedjata berada di tangan orang2 bukan tentara atau anggota2 alat2 Negara dan beranggotakan para politikus, maka dikawatirkan, sepesi yang pengetahuan Pemerintah, soal itu tidak ada.

Soal2 Luar Negeri.

Diterangkan, bahwa dalam hal penindahan atau penempatan Kepala2 Perwakilan, Pemerintah tidak menjangkau dari prosedur jri biasa, yaitu dengan menentang lebih dulu Presiden sebelum mengambil keputusan.

Saran untuk mengaktif Laos dan Kambodja sejajar dg jura sudah lama ditjajarkan oleh Pemerintah, tetapi belum dapat dimajukan karena perundingan tentang pertukaran perwakilan diplomatik dgn Pemerintah tsb belum selesai.

Mengenai peristiwa2 Gessoraki di Maluku Utara ditjelaskan, bah-

SUARA MERDEKA

SMG., KEMIS 16 JULI 1955

HARIAN UMUM — ANGGAUTA S. P. S.

TAHUN KE X — No. 123

Dekrit Presiden Dan Lahirnja Kabinet Kerdja Suatu Kemenangan

Dgn Brooklax Polisi Perairan Bongkar Selundupan Emas Selain Memberantas Selundupan Juga Menolong Ketjelaksanaan Laut — Kenal kan Tugas Polisi Perairan

Oleh Suryanthe.
SUATU SENDJA DIBULAN Maret 1955. . . . Seorang agen polisi mengisarkan arah teropongnja kependjuru sekiranya, ditengah2 gelombang besar dan tuaaja mendung dan gelap yang meliputi laut disekitar Turakan, Tibu2 ia menanjakkan teropongnja kesuatu arah, memperhatikan dengan teliti, mejakinkan pandangannja dan melaporknja dengan sikap: "Sebuah perahu Bugis direpan".

IP. 1 Amrullah Kamaruddin mengambil teropongnja, menjar2 arah yang ditunjukkan dan meintukan arah perahu itu dengan cepat dan kemudian keluarlah erintahnja: "Haluan 0731 Ketja akan perahu".
Djuru-mudi melupangi perintih itu, memutar haluan kearah 73 dan mesempatkan panah pada ruang "full-speed" dan sebersar kemudian menderalah kapal arafel polisi perairan. Anglung itu menjabak gelombang laut Sulawesi dengan ketepatan enuh.

Perahu Bugis yang tahu akan bahaya" yang sedang mengancam, memutar haluannja dan berusaha melarikan diri. Suatu temakan peringatan menggentijr da 20 mm AA-Gun "Angklut" arah perahu itu, tapi karena mbukan peringatan itu tak diperdulikan, djuru-tembak terpaksa memundahkan sasarannja kele in haluan perahu. Air memuntit hanya beberapa meter didepan perahu itu. Akhirnya pengeudi perahu merasa agerri dijaga, merjerah dan mendekat.
Pengelelahan dilakukan dan rajata didalamnja terdapat 4 ton bahan peledak yang terdiri dari 100 lb dinamit, 100 lb granat dan jenis bahan peledak lainnya, dialamatkan kepada abar Mezakkar.

Itulah salah satu dari berpuluh-puluh yang telah ditjapai oleh polisi perairan kita dalam menjalankan fungsi dan tugas polision diperairan wilayah Indonesia.

Tugas polisi perairan. Sesungguhnya, kebutuhan akan laut sebagai suatu negara dan na takiran kasar terdiri dari 800-nuluu dirianak sedilan de

Kesulitan yang dihadapi polisi perairan ialah berita tentang ketjelaksanaan tidak sampai pada waktu yang tepat dan tepat.
Mula-mula, soal-jalan terhitung ada ketjelaksanaan. Kerata-jalan menakar ditolak tidak begitu mendak. Dan tererka lainja mengenai 1 perantara angini. Tintur, Harit, Mars dan Belawan, Moreska, Tala, ta-ku-ahnja Tenggara, Timorlaut, Baratdaya atau Baratdaya.
Apalagi peralajaran dalam bagian yang telah ketjil.
Djadi, dalam merenda mengatur ke-pada-pada perahu. Ada ketjelaksanaan perahu dirantau terapan 2 km. Diudara diatas awan, maka pereroda dari arah ketjelaksanaan, kemudian ke-pada-pada polisi perairan, laporan itu mungkin sedikit yang dapat dirjadi. Dan setelah didalam peralajaran di-nya-marah perahu, tererata ketjelaksanaan itu bukan tererata. 1 km di-nya-udara diatas awan" juga sampai "10 km diperairan diatas awan".

Keperluan dijaga, ketjerangan selajnja yang kadang-kadang itu merupakan haluan besar bagi polisi perairan dalam menjalankan tugasnja.
Sekali udara-pada dibentak. Tgl. 14 September 1955 ini, polisi perairan mendapat laporan bahwa ketjelaksanaan sebuah speedboat telah tererata di dekat Udjung Krowang. Sebuah kapal perikanan sedang dikirim. Tjaja gelombang sangat besar. Tjaja buruk, udara gelap dan gerimis.

Dalam keadaan demikian, menjar2 perahu tergelombang dengan, perumpungan yang memerobokkan bantuan dengan segera, bukannya soal yang mudah. Kapal itu segera me ngadakan hibanangan dengan pang haluanja untuk memberikan laporan.

Sebelum kemudian, bereslah terak sebuah perahu tererata dari panti di perairan, sesuai udara sulak-se-wayang-mana perumpungan itu men-tjaja yang haluan dari udara.
Lajnja bukan soal mudah selajnja peralajaran yang memperpergunakan "perumpungan" yang haluan diantnja hanya menjar2 dan sampai selajnja dari perumpungan itu, dalam keadaan udara buruk dan ditjerah-ditjerah, perumpungan yang besar, juga haluan perumpungan tererata.

Ditjaja tererata perumpungan itu di udara dari polisi perairan. Tapi sebagai salah satu yang tererata, juga ditjaja tererata perumpungan itu.

BRIG DJENDERAL MUSTOPO menerangkan bahwa dekrit Presiden Panglima Tertinggi dan lahirnja Kabinet Kerdja sekaligus dirasakan sebagai suatu kemenangan negara dan rakyat Indonesia. Dengan kejadian itu sekaligus pula paywar musuh yang hendak memetjabelah kita terpuak hantjir de-mikian Mustopo. Ia menjatakan hal itu pada kesempatan peremuanja dengan anggota2 pimpinan Liga Kerdjasama Ideologi yang diketeminnja diruangan BKS Bumi di Djakarta Selasa siang dimana ia memberikan kesannja dari peninjannja: ketjerah Maluku dan Irian Barat baru2 ini.

Radioaktivitet Laut Tiap Th. Tambah seser

MENURUT laporan Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Amerika Serikat yang diumumkan hari ini, di Washington, ratusan kapal atom yang dilaga akan mengeragi samudra dengan membuang be-ban radioaktivitet yang tak terpuak lagi oleh kapal-kapal itu dilant. Dike-sukaan dalam laporan itu, bah-wa radioaktivitet laut setiap ta-kun akan sebesar 800.000 erer.
Udara menjaja bahwa ada ba-han bakar yang radioaktivitet dari ka-pal atom yang meminjakan ke-ke-ban umum, panjka, akademi itu, yang ererum menjelidiki pe-ngaruh atom terhadap perikanan dan geografis, dalam laporan itu ditjajakan program 3 pokok: (1) Bahan bakar atom yang radioaktivitet beresal dari metode kapal-kapal dengan dibuang dipelalaban, memara, su-hal atau dalam perairan yang ka-rang dari 22 KM (13 mil) dari panti; (2) Kapal-kapal yang digerakkan dengan tenaga atom harus diperisaknja dengan terapan penjijaran; ba-han bakar atom dari reaktor2 kapal dan sisa bahan bakar itu dapat dibuang dalam laut diserasaj di-bur dan belawan beresal; (3) bahan-bahan perikanan itu dari mesin2 kapal-kapal dengan dibuang dalam laut yang kurang dari 12 mil (19 KM) dari panti. (Antara-AFT).

Dengan dekrit Presiden dan Kabinet Kerdjinnja itu kita dapat dan harus mengerdjikan 3 rangkain usaha selain 3 pasal program Kabinet Kerdja yaitu men-berantas kemiskinan rakyat, men-berantas perperajaan, kebobolan dan kedjajaban akhlak Rusa Mo-topo. Berharaja tererata tugas Front Nasional dimana ini ia me-rijatkan, bahwa Front Nasional harus terus bekeraja dalam tugas itu selaku perubnja. Penguasa Perang dan Perantara Chusinnja untuk pembebasan Irian Barat dan penyelesaian revolusi nasional unumnja.

Andjag Ganggu Para Petugas Pos Di Bandung

PARA petugas pengantar surat PTT dalam menjalankan tugas sehari-harinnja mengahjarkan surat tidak sedikit yang mengotah. Meraka mengeluh tererata sekali da-lam mengahjarkan surat yang di-perusulkan urang yang memer-para andjag. Sering sekali tererata di awakin mereka (pengantar su-

ur) dan harus mengerdjikan 3 rangkain usaha selain 3 pasal program Kabinet Kerdja yaitu men-berantas kemiskinan rakyat, men-berantas perperajaan, kebobolan dan kedjajaban akhlak Rusa Mo-topo. Berharaja tererata tugas Front Nasional dimana ini ia me-rijatkan, bahwa Front Nasional harus terus bekeraja dalam tugas itu selaku perubnja. Penguasa Perang dan Perantara Chusinnja untuk pembebasan Irian Barat dan penyelesaian revolusi nasional unumnja.

Bekerja terus dalam pesgeritan peraja kepada pimpinan Bung Karno, pimpinan revolusi kita sekarang, kata Mustopo. Me-njann kesannja setelah menin-djak ketjerah Maluku dan Irian Barat baru2 ini Dr. Mustopo me-rijatkan bahwa tererata menjaja la2 gelora dan semangat rakyat untuk perjuangnja pembebasan Irian Barat di-derep2 yang me-rupakan front terdepan ini. Ada nja demonstrasi2 dengan: Belan da achir2 ini sebagai protes ter-halap penginjran militer dan ini ini oleh Pemerintah Belanda ke Irian Barat adalah buku kita ma-dja setapak lagi dalam perjuang-an kita, kata Dr. Mustopo. Ia mengahjarkan dan memperingat-kan agar kita dengan sampai menjadi apatis dan sikap masa bodoh. Misi kita bekeraja untuk kepentingan rakyat dan machnik Tuhan yang tererangnja sekarang ini dengan dijaja memberikan kemakinnan perperajaan dan ke-bodohan demikian Brig. Djend. Dr. Mustopo. (Antara)

SUARA MERDEKA

MUSPAT 31 JULI '59

HARIAN UMUM — ANGGAUTA S. P. S.

TAHUN KE X — No. 136

Wk. Masjumi Tidak Didudukkan Dlm Dewan Pertimbangan Agung

Kabinet Kemarin Telah Mengambil putusan Ytg. Susunan Dan Nama2 Anggota DPA Sementara Dan Dewan Perantjang Nasional—DPA Dan DPN Dilantik Besok 15 Agustus

KABINET INTI dalam sidang hari Kamis kemarin mengambil putusan tentang susunan dan nama2 anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara dan Dewan Perantjang Nasional. Anggota DPA Sementara berjumlah 45 orang tidak termasuk ketua2 Presiden Sukarno dan terdiri dari golongan2 politik 12 orang, wakil2 daerah 8 orang, golongan karya 24 orang, yaitu dari golongan buruh, tani, pengusaha nasional, angkatan 45, angkatan perang, agama, tjendekiawan dan warganegara keturunan asing. Dalam DPA Sementara duduk sebagai wakil golongan politik al. wakil2 3 partai besar yaitu Suwirjo, Manuaba dari PNI, Ilham Chalid dan Saifuddin Zuhri dari NU dan D.N. Aidit dan Njoto dari PKI.

PGRI Slap Ke Irian Barat

MENTERI MUDA pengerahan tenaga rakyat, Sudjono, yang juga menjadi anggota pengurus besar PGRI, menerangkan, di Jogyakarta, bahwa kementerian PPK dewasa ini tidak mengalami kesulitan untuk menggerakkan guru2 ke Irian. Dikata dimampukan juga. Dikata ada kesukaran, maka itu ditangan2 dari daerah dimana guru itu akan ditempatkan. Masalahnya soal2 mengenai perumahan, dll. dan hal ini merupakan soal yang dihadapi oleh tiap2 daerah itu. Tetapi tenaga2

DPA Sementara diketuai Presiden Sukarno dan sebagai Wakil Ketua Huslan Abdulgani. Sebagai anggota DPA diambil dari bekas anggota DPA diambil dari bekas anggota Dewan Nasional. Dewan Perantjang Nasional terdiri 72 orang dipimpin seorang Ketua dan 2 Wakil Ketua, yaitu Mr. Mah. Yasin Ketua dan Wakil Ketua Ir. Ekar Bratakusuma, Kolonel Dr. Suhardi dan Ir. Sakirman. Anggota Depernas (Dewan Perantjang Nasional) terdiri dari golongan karya dan wakil2 daerah. Baik DPA sementara maupun Dewan Perantjang Nasional akan dilantik 15 Agustus jald. di Istana Negara Jakarta. (Antara)

Berpusa & Memblu Safama 49 Hari

Untuk Djadi "Budha Hidup"

SEORANG pertama Tionghoa di Praang yang ingin menjadi seorang Buddha Hidup, pada tgl. 3 September jald. akan masuk ke dalam sebuah peti katja dan diam disana selama 49 hari. Selama 7 minggu itu peti katja Lim Hwe Hor akan berpusing dan tidak mengutipkan seputih per-



— MISSI MUHIBAH KUBA DI INDONESIA —
Utusan Perdana Menteri Fidel Castro yang merangkap Missi Perdagangan dari Cuba yang terdiri dari 6 orang dan diketuai oleh Mayor Ernesto Guevara Gerna, hari Rabu siang dengan menumpang pesawat N.A.S. telah tiba di lapangan terbang Kemayoran Jakarta. Nama2 anggotanya ialah: Kapten Cantareso Omar Ferrandez, Letnan Jose Agudein Mendosa, Letnan Yallo Francisco, Dr. Alfredo Cruz dan Jose Fardo Eleta (wartawan).

SUARA MERDEKA

SMG., DJUM'AT 14 AGUST. 59

HARIAN UMUM — ANGGAUTA S. P. S.

TAHUN KI X — No. 148

Perkara Mr. Kasman Singodimedjo Akan Diteruskan ke Mah Agung Djuga Sedang Dalam Tingkat Pemeriksaan Perkara Beberapa Bekas Menteri Dan Orang2 Penting — Antaranya Perkara Pelanggaran Kriminil

PERKARA MR. KASMAN SINGODIMEDJO, salah seorang tokoh Masjumi yang sedjak beberapa waktu j.l. berada dalam tahanan sementara, menurut keterangan2 yang diperoleh „Antara”, tetap akan diteruskan kepada Mahkamah Agung Indonesia. Kasman pokoknja dituduh telah mengutipkan kata2 yang sifatnja membantu kaum pemberontak PRRI, dalam salah satu pidatonya dimuka rapat umum Masjumi di Magelang beberapa waktu j.l.



Pemeriksaan2 pendahuluan terhadap dirinya telah dilakukan oleh Kedjaksanaan Agung sedjak beberapa waktu j.l. djuga telah selesai didengar keterangan2 dari beberapa orang saksi, antaranya pihak DPKN setempat di Magelang, penitja penjelenggara rapat umum Masjumi setempat dll. Penahanan sementara atas diri tokoh Masjumi itu dilakukan atas perintah pihak militer, yang kesediaan menjerahkan perkara itu kepada Kedjaksanaan Agung guna pemeriksaan2 lebih lanjut. Djika perkara Kasman ini diteruskan ke Mahkamah Agung Indonesia, menurut keterangan, ia akan dibela oleh Mr. Moh Rum.

SUARA MERDEKA

SAING, SELASA 18 AGUSTE '59

HARIAN UMUM — ANGGAUTA S. P. S.

TAHUN KE X — No.

Penemuan Kembali Revolusi

Rakjat Djanganlah Mengeluh Tanda Kelemahan Djiwa — Bangkitlah Kembali Revolusi -- Amanat Presiden pd Peringatan Ke-14 Ha

PRESIDEN SUKARNO dalam amanatnja pada upatjara peringatan ulang tahun Kemerdekaan jang berlangsung di Istana Merdeka Djakarta hari Senin kemarin telah menja tahun „rediscovery of our revolution“. Tahun penemuan kembali revolusi, tahun dalam ma djiwa revolusi. Oleh karena itulah, demikian Presiden, tahun 1959 menduduki tempat jang perjuangann nasional kita; satu tempat jang unik.

Ulang tahun ke-14 daripada proklamasi kita ini harus benar2 membuka halaman baru dalam sejarah revolusi kita, halaman baru dalam sejarah perjuangan kita. Amanat Presiden pada pagi hari Senin itu terdiri dari 96 halaman diketik apot dan ditjapkan dalam waktu 2 djam 20 menit, ialah dari djam 08.15 — 10.35. Tidak kurang dari 1 djuta rakjat Djakarta disamping pembesar2 tinggi dan korps diplomatik menghadiri upatjara di Istana Merdeka jang kemudia di lanjutkan dengan pawal 45.

Presiden dalam amanatnja itu telah menjerukan pula supaya rakjat Indonesia bangkit kembali dengan djiwa revolusi memasuki alam pikiran baru untuk berdjalan terus diatas rel menyelesaikan tjdjian revolusi tanpa ragu. Diberikan pula agar rakjat djangan mengeluh karena mengeluh adalah tanda kelemahan djiwa. Kesulitan2 jang kita hadapi tidak akan dapat

Kematjatan2 bisa kita bangkai.

Oleh Presiden dibatahkan bahwa segala besapuan2 kita dalam usaha-usaha mentjapai tujuan revolusi bukan sesial2 terletak pada kekurangan alat2 atau karena ketolakan kita, tetapi disebabkan karena selama disempalja atau tidak sempalja adanya penyelesaian2 penjelenggaraan dari djarat2 dan tjdjian revolusi. Kefatinjng penjelenggaraan ini karena kita menpergunakan UUDS 1950 ja menpergunakan UUD 1945 ja menpergunakan UUD 1950 itu ditjapai karena kita menpergunakan djiwa revolusi sampai menjajapkan UUD perjuangann kita, yakni UUD 1945. Oleh karena itu dia memazuki periode investment teras pada kita ulanja penumbuh kumbroni tadi. Penjajit danisme Rabbul, djiwa revolusi hampir padam, tjdjian revolusi diganti dengan politik dan ekonomii liberal dalam mana semua ter

hanting stwar utk kembali ke UUD 1945 dan bisa kita ketemu kembali letak kematjatan2ja sehingga bisa kita bangkai sama sekali. Kini setelah kita kembali ke UUD 45 dan untuk menghadapi usaha2 mentjapai tujuan revolusi srtandjajnja kita perlu mengadakan „slak upama“ meninjau perlekapant2 sebagai alat perjuangann.

Kita selawasnj telah menjadi: 1. UUD 45 sebagai UUD Perjuangann. 2. Hasil perdjajira dan kerjann rakjat jang beraps materiil dan hader baru. 3. Tumbuhnja kekuatan ekonomii nasional jang telah ada 70% dari seluruh kekal dan ekonomii di Indonesia. 4. Bidang administrasi jang lebih baik. 5. Wajah Republik Indonesia ja kumprasi tidak ada tarasja. 6. Kepertjajaan atas kemampuan dan keuletan kita sendiri. 7. Kekayaan alam jang tidak ada tandjajannja di seluruh dunia. Ini semua ada

terjorot dari bakum perjuangann. Dalam bidang sosial akan dilakukan usaha2 jang bisa menaikan „penghidjswantaban“ dari masa perjuangann, gotong royong di selenggara. (Ina lapis kemudi) 4 rila. Dengan sistem liberalisasi seperti djabut berjata semua kan rajnja bagi kesadaran suu kita.

Dibidang kemanaan tugas perintah masih luas dan berat. 1. revolusi2 pemberontak2 dan 2. subversif akan diambil tindakan demersy tegas tanpa berdjua dan tanpa kompromi. Dalam hubungan ini oleh Presiden di mukakan sjtuna djawat angka perant2 dan usaha2 penjem miamant2 jang selabu diperintati oleh pemerintah.

Istia Ha

Dalam usaha menperjajit kembali Irian Barat keulajat, I. dikatakan bahwa tahun ini menjadi pemerintahan ialah men

150
tuh
tu-
na
mal
ak-
utib,
n ke
sewu
miki
jang
rma,
ntuk
djad
a se
ing
itu,
te se
ngan
mbu

SUARA MERDEKA

SMG., RABU 19 AGUSTUS '59

HARIAN UMUM — ANGGAUTA S. P. S.

TAHUN KE X — No. 151

ini dalam peredaran Revolusi fisik.

Revolusi sosial-ekonomi. 1956. Mulai dengan tahun ini kita ingin memasuki satu periode baru. Kita ingin memasuki peredaran Revolusi sosial-ekonomi, untuk mencapai tujuan terakhir daripada Revolusi kita, yaitu satu masyarakat adil dan makmur. ...tata-terang-kerta-rahar-dja. Tidakkah demikian, saudara-saudara? Kita berrevolusi, kita berjuang, kita berkolaborasi, kita berdamai dengan mau, roh bukannya hanya untuk menaikkan ben-dera Sang Merah Putih, bukan hanya untuk melepaskan Sang Garuda Indonesia terbang di angkasa? Kita bergerak. — demikian saja tuliskan dalam risalah "Men-tjapai Indonesia Merdeka" ham-pir tigapuluh tahun yang lalu. — Kita bergerak karena kesenja-rnaan kita, kita bergerak karena ingin hidup lebih lajak dan sem-purna. Kita bergerak tidak kare-na "ideaal" saja, kita bergerak karena ingin tjukup makanan, ingin tjukup pakaian, ingin tjukup tanah, ingin tjukup peruma-han, ingin tjukup pendidikan, ingin tjukup minuman seni dan kultur. — pendek kata kita bergerak karena ingin perbaiki nasib didalam segala bagian2-nja dan tjabang2-nja.

Perhatikan nasib ini, hanjalah bisa datang seratus procent, bila

Tahun '59 Ih. Penemuan Kembali Revolusi Kita

Amanat Presiden Pada Tg. 17 Agustus 1959

ban, Undang-Undang-Dasar 1945. — Undang-Undang-Dasar Proklamasi —, benar2 terjata Undang-Undang-Dasar Perdjooan, benar2 terjata satu pelopor daripada alat-perdjooan! Dgn. Djiwa Proklamasi dan dengan Undang-Undang-Dasar Prokla-masi itu, perdjooan berdjalan pesat, malah perdjooan lak-sana lawine yang makin lama makin gemuruh dan ta' tertahan, me-njapu bersih segala penghalang!

Padahal ialah! Alat-alat yang be-rupa perbendaan (materiil) pada waktu itu serba kurang, serba se-dethana, serba dibawah minimum! Keuangan tambal-sulam. Angka-tan Perang tjumpang-tjumpang, ke-kuasaan politik dtaruh-bangun, daerah defacto Republik Indonesia kadang-kadang hanya seperti se-lebar-pajung. Tetapi Djiwa Proklamasi dan Undang-Undang-Da-sar Proklamasi mengikat dan mem-

beri bahwa K.M.B. adalah satu kompromis!

Orang2 yang demikian itu ada-lah orang2 yang pernah saja na-makan orang2 possibilis, orang2 yang pada hakekatnja tidak dina-mis-revolusioner, bahkan mung-kin kontra-revolusioner. Orang2 yang demikian itu sedikitnja ada-lah orang2 yang beku, orang2 yg tidak mengarti maknanya "tak-tik", orang2 yang menjampur-bayurkan taktik dan tujuan, orang2 yang diwanja "mandek".

Orang2 yang demikian itulah, disamping sebab-sebanja lain, meratujui djiwa bangsa Indone-sia sedjak 1950 dgn. ratjunja reformisme. Merekalah yang mendjadi salah satu sebab ke-munduran modal mental dari-pada Revolusi kita sedjak 1950, meskipun dilapangan peralatan materiil kita mengalami sedikit kemajuan. Kalau tergantung dari

revisi pada waktu perimbangan kekuatan berubah. Mitalnja per-djadjahan terhadap bangsa lain, meski tadinja ta disetudjil dalam sesuatu perdjandjian internasio-nal sekalipun, ta dapat diterima sebagai suatu hukum yang mul-lak dan abadi, yang harus dibe-narkan terus-menerus sampai ke-akhir zaman! Ia harus ditjela se-tadjam-tadjamnja, ditentang ma-ti-matian, ditiadakan selekas mungkin. Tidak boleh kita mem-biarkan langgeng dan abadi se-suatu hukum yang berdasarkan pe-nguasaan silemah oleh sikunt.

Saudara2, saja masih dalam membitjarkan periode survival. Selama kita masih dalam periode survival ini, maka segala kompro-mis dan reformisme yang saja se-butkan tadi tidak begitu disadari akan akibatnja. Ia mungkin tera-sa kadang2, bahwa djalannja per-tumbuhan anak seras, tetapi kese-